

p-ISSN: 2580-8559
e-ISSN: 2580-8540

JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK
VOLUME 3, NO 1, JULI 2018

ETNIS DAN PEREMPUAN DI ARAS LOKAL

R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi Kurniawan

**PERAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI (KOPIPEDE)
PROVINSI JAMBI MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT
MENGHADAPI PEMILU 2019**

Mochammad Farisi, Nopyandri

**ANALISA KREDIBILITAS MUSTAFA-AJA PADA PEMBERITAAN MEDIA
SEBELUM DAN SESUDAH KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)
KPK (Analisis Framing Pemberitaan Calon Gubernur Lampung Pada Portal
Berita Online Radar Lampung Online dan Lampost.co Periode Januari - April
2018)**

Abdurrahman

**MAKNA BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL (Analisis
Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun
Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober)**

Emmy Martiastiwi

**ANALISIS FRAMING PERSEPSI FOLLOWER AKUN FACEBOOK PARTAI
PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) DPC KOTAMADYA BANDAR
LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI
LAMPUNG**

I Nengah Setat

**MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN
MASYARAKAT SIPIL**

Hartoyo

JASP	Vol. 3	No. 1	Hlm. 1-89	Bandar Lampung Juli 2017	p-ISSN: 2580-8559
------	--------	-------	-----------	--------------------------	-------------------

p-ISSN: 2580-8559
e-ISSN: 2580-8540

**JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK
VOLUME 3, NO 1, JULI 2018**

DAFTAR ISI

ETNIS DAN PEREMPUAN DI ARAS LOKAL

R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi Kurniawan..... 1-10

**PERAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI (KOPIPEDE)
PROVINSI JAMBI MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT
MENGHADAPI PEMILU 2019**

Mochammad Farisi, Nopyandri..... 11-23

**ANALISA KREDIBILITAS MUSTAFA-AJA PADA PEMBERITAAN MEDIA
SEBELUM DAN SESUDAH KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)
KPK (Analisis Framing Pemberitaan Calon Gubernur Lampung Pada Portal
Berita Online Radar Lampung Online dan Lampost.co Periode Januari - April
2018)**

Abdurrahman 24-45

**MAKNA BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL (Analisis
Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun
Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober)**

Emmy Martiastwi 46-54

**ANALISIS FRAMING PERSEPSI FOLLOWER AKUN FACEBOOK PARTAI
PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) DPC KOTAMADYA BANDAR
LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI
LAMPUNG**

I Nengah Setat 55-76

**MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN
MASYARAKAT SIPIL**

Hartoyo 77-89

ETNIS DAN PEREMPUAN DI ARAS LOKAL

R. Sigit Krisbintoro, Robi Cahyadi Kurniawan

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: robicahyadi9@gmail.com

ABSTRAK

Etnis memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal, berdasarkan asumsi itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.. Survey dilakukan dengan metode penarikan sampel *Stratified Random Sampling*, dengan jumlah sampel 662 dengan metode sampel berdasarkan perhitungan dari Sugiyono (2006:93). Survey dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Hasil survey memperlihatkan bahwa etnis masih berpengaruh signifikan pada pemilukada Way Kanan 2015 lalu terutama pada etnis Lampung dan Etnis Jawa. Hasil Survey juga memperlihatkan bahwa peran istri-istri kandidat terhadap pemilih perempuan memiliki pengaruh walau tidak terlalu besar.

Kata Kunci : etnis, kuasa, pilkada, perempuan

ABSTRACT

The ethnic group has an influence in local elections at the local level, based on the assumption that this research is conducted. This research was conducted by survey method in all sub-districts in Way Kanan District in Lampung Province. The survey was conducted by Stratified Random Sampling method with 662 samples based on Sugiyono (2006: 93). The survey was conducted from August to September 2015. The survey results show that ethnicity still has a significant effect on the 2017 in Way Kanan local election, especially on Lampung ethnic and Javanese ethnic. The Survey results also show that the role of candidate's wives to female voters has an influence, although not too great.

Keywords: ethnicity, power, elections, women

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemilukada, hubungan antara kontestan dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya ikatan tradisional maupun primordial. Kontestan tidak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih. Tentunya tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kontestan

beramai-ramai mendekati pemilih agar memberikan suaranya. Hubungan pasif seperti ini, seperti yang telah diungkapkan, membuat pemilih menjadi objek politik.

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sarana penyaluran aspirasi yang paling efektif di tengah kondisi masyarakat yang sulit untuk menyalurkan aspirasinya. Setelah Orde Baru reformasi kehidupan politik di

Indonesia banyak mengalami perubahan dan keterbukaan. Rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan politik di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui azas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia Desember 2015 lalu, khususnya di Provinsi Lampung dilakukan pada 8 kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan di Way Kanan, tiga bulan sebelum pemilukada serentak bulan Desember 2015 dilakukan,

fungsinya adalah untuk melihat peta politik sebelum pelaksanaan Pemilukada Way Kanan tahun 2015. Penelitian ini dibatasi dalam konteks etnis masyarakat pemilih, khususnya etnis Jawa dan Lampung, serta peran istri-istri kandidat calon terhadap orientasi memilih pemilih etnis Jawa dan Lampung pada pemilih perempuan di Way Kanan.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei atau jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat. Surevi adalah cara untuk mengetahui pendapat masyarakat atau pilihan pemilih, hanya dengan mewawancarai sedikit orang. Tetapi metode yang dipakai haruslah benar agar sedikit orang itu mewakili (representasi) dari suara banyak orang

Survey ini memakai metode penarikan sampel *Stratified Random Sampling*. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang hetegoren (tidak homogen) dan berstrata, baik proporsional maupun tidak. (Sugiyono; 2006:93). Teknik ini cocok untuk mengambil sampel dari populasi yang beragam, baik dari segi jenis penduduk, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan umur responden/sampel yang beragam

PEMBAHASAN

Konsepsi Etnis

Secara etimologis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang

ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat (Liliweri, 2005).

Para ilmuwan politik memandang konsepsi mengenai hakekat etnisitas dimaknai dua hal. *Pertama*, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. *Kedua*, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indentifikasi diri dan sosial. Dua makna ini bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah (kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup suku, ras, nasionalitas dan kasta.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai etnis yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis adalah pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang paling penting para anggota dari

kelompok etnis itu mempunyai perasaan sendiri yang secara tradisional berbeda dengan kelompok sosial lain.

Kedua, suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama. Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang kita sebut dengan *ethnic domain*. Susane Langer (2001) mengatakan bahwa kerap kali kelompok etnis itu mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk kesenian atau *art* yang sama, yang diciptakan dalam ruang dan waktu mereka.

Pembahasan mengenai identitas etnis sebagai identitas diri seseorang merupakan sesuatu yang relevan dan benar di dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur. Hal ini dimungkinkan agar orang lain memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui asal-usul itulah setiap orang dapat mendefinisikan tentang “Bagaimana saya berbeda dengan orang lain?” dan dari sinilah dapat diketahui “Apakah kita sama dengan orang lain?” Dengan demikian keberadaan etnik maupun ras memberikan makna tentang keberadaan kita sebagai manusia yang nyata karena memiliki dan berada dalam konteks sejarah dan konteks sosial (etnis). Kita juga memiliki tipologi yang secara fisik berbeda dengan orang lain (*biological or natuarl category*) (Theodor W. Allen, 1993).

Mengenai konsep ini Charmen dan Champion (2002) mengatakan bahwa:

“Identitas diri suatu etnis adalah integrasi dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam satu konsep diri. Harus diakui bahwa etnisitas juga merupakan salah satu akibat dari identitas diri yang mengalir dari nilai, tata cara, gaya, dan latar belakang individu seseorang. Identitas etnis tidak mengalir dari opini atau prasangka yang berkembang dalam suatu masyarakat luas. Identitas etnis dibangun dari dalam.”

Kita bisa mengidentifikasi suatu etnis sekurang-kurangnya melalui karakteristik budaya (sub-kultur). Misalnya ketika kita datang ke suatu negara, orang-orang dalam negara tersebut akan membedakan kita pendatang (*other*) dengan mereka (orang-orang) di negara itu sendiri. Bahkan di negara tersebut mereka juga membedakan diri mereka sebagai “penduduk asli” dengan “keturunan”. Jadi secara esensial orang-orang sadar akan adanya perbedaan identitas melalui pemahaman *self* dan *other*.

Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik (pilkada) sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Seperti yang ditafsirkan oleh ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas yaitu Agnes Heller yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L

Morowitz (1998) pakar politik dari Universitas Duke mendefinisikan:

“Politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.”

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik keberbedaan. Mereka menjelaskan bahwa politik identitas adalah suatu mekanisme dalam politik yang memberikan batas-batas dalam kategori pembeda bagi mereka yang tidak memiliki rasa persamaan dengan kita yang kemudian ditunjukkan melalui dipilih dan tidak dipilih.

Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di selenggarakan di Winapada 1994. Pertemuan di Wina tersebut melahirkan dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa:

“Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.”

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Kekuasaan dalam Budaya dan Etnis Indonesia memiliki konsepsi kekuasaan yang berbeda dengan literatur-literatur yang berasal dari barat, salah satunya adalah konsepsi kekuasaan Jawa. Konsepsi Jawa tentang kekuasaan berbeda secara radikal dengan konsep yang telah berkembang di barat sejak abad-abad pertengahan, dari perbedaan ini secara logis mengakibatkan perbedaan mencolok pada pandangan terhadap cara kerja politik dan sejarah (Anderson, 2000:42).

Konsepsi kekuasaan dalam kacamata Eropa modern dapat diringkas dalam empat poin: *pertama*; kekuasaan adalah abstrak (dalam arti terbatas atau tidak ada), *kedua*; sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen, *ketiga*; penumpukan kekuasaan tidak memiliki batasan inheren, *keempat*; kekuasaan adalah ambigu (Anderson, 2000:43-46).

Konsepsi kekuasaan Jawa berlaku sebaliknya dari apa yang dipaparkan oleh konsep eropa, konsepsi kekuasaan Jawa menurut Benedict R. OG. Anderson (2000:47-50) adalah sebagai berikut; *Pertama* Kekuasaan adalah konkret. Kekuasaan adalah sesuatu yang nyata ada, tidak tergantung pada pihak-pihak yang mungkin menggunakannya, kekuasaan bukanlah suatu postulat teoritis tetapi adalah sebuah kenyataan eksistensial. Kekuasaan adalah tenaga yang tidak tampak, misterius bersifat ilahiyah yang menghidupi semesta. Kekuasaan terejawantahkan kepada setiap aspek alam, batu, pohon, awan, api, dalam pemikiran tradisional Jawa tidak ada pemisahan yang tegas antara benda hidup dan tidak hidup, karena semuanya ditopang oleh kekuasaan yang tak tampak yang sama.

Kedua; kekuasaan adalah homogen. Hal ini mengikuti konsepsi bahwa seluruh kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama, kekuasaan ditangan satu individu maupun kelompok adalah sama dengan yang berada di tangan individu dan kelompok yang lain. *Ketiga*; Besarnya kekuasaan didalam semesta adalah konstan. Dalam pandangan Jawa, jagat raya tidaklah berkembang atau menyusut, jumlah total kekuasaan didalamnya pun selalu

tetap. Kekuasaan semata ada, bukan merupakan produk dari organisasi, kekayaan, persenjataan atau apapun yang lain. Kuantitas keseluruhannya tidaklah berubah, meskipun pendistribusian kekuasaan di dalam semesta mungkin beragam. *Keempat*; Kekuasaan tidaklah mempertanyakan keabsahan. Seluruh kekuasaan diturunkan dari sumber tunggal yang homogen, kekuasaan itu sendiri mengatasi pertanyaan baik-buruk, bagi pemikiran Jawa tidak ada artinya mempertanyakan klaim untuk memerintah berdasarkan perbedaan sumber kekuasaan. Kekuasaan tidaklah absah atau tidak absah, kekuasaan itu ada.

Menurut budaya Jawa, kekuasaan diperoleh dengan acara bertapa dan praktek yoga, seperti berpuasa, berjalan tanpa tidur, meditasi, dan tidak melakukan hubungan kelamin dalam jangka waktu tertentu, juga diperoleh dengan mengadakan upacara-upacara kebesaran yang melibatkan banyak orang, objek-objek yang mengandung kekuatan, serta simbol-simbol yang mengandung pengertian mistis. Cara lain yaitu dengan mengumpulkan benda-benda, seperti keris, gamelan, kereta kencana, payung kebesaran, atau barang-barang pusaka lainnya, atau mereka yang dipandang mempunyai kesaktian (*kesakten*), seperti pelawak, orang kasim, orang kerdil, peramal, dukun, resi atau orang yang dianggap memiliki kelebihan (Surbakti, 1992:83).

Kekuasaan dalam budaya Jawa diidentifikasi dengan tanda-tanda sebagai berikut; orang yang

memusatkan kekuatan diri (dengan bertapa), menyerap kekuasaan dari luar (klaim inkarnasi dari dewa), memusatkan di dalam dirinya sendiri hal-hal yang bertentangan¹ serta adanya wahyu,² kehadiran kekuasaan sehari-hari dapat dilihat pada wajah orang yang berkuasa yaitu ada tidaknya cahaya (*teja*) pada wajah orang yang berkuasa (Surbakti, 1992:83).

Kekuasaan juga memiliki ciri-ciri sosial yang meliputi kesuburan, kemakmuran, stabilitas dan kemuliaan. Kesuburan dapat dilihat dari jumlah jumlah keturunan dan cucu si penguasa, kemakmuran dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat seperti terjaminnya kebutuhan pokok, stabilitas menggambarkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sedangkan kemuliaan berdasarkan kebesaran dan kejayaan sebuah kerajaan atau negara yang bersangkutan ditandai dengan banyaknya kepala pemerintahan atau kepala negara asing yang mengunjungi negara tersebut (Surbakti, 1992:83).

Pemilihan Umum

1 Kemampuan memusatkan hal-hal yang bertentangan dalam dirinya, seperti jenis kelamin (laki-laki dan wanita), pemikiran (nasionalisme, komunisme, nasakom), agama (islam, Kristen, hindu, budha, aliam kepercayaan), dan golongan (militer, partai, daerah).

2 Wahyu (*devine radiance*), diyakini bisa berpindah, perpindahan wahyu biasanya menandai memudarnya atau jatuhnya suatu dinasti atau rezim.

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik. Artinya pemilu merupakan mekanisme untuk melakukan pergantian elit politik atau pembuat kebijakan (Laila, 2004:2). Dari pemilu ini diharapkan lahirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan bukan sebagai tujuan demokrasi. Menurut Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum bahwa:

“Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan menurut Karim dalam Dani (2006:11) Pemilihan umum adalah:

”Sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

Pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya pemilu merupakan roh demokrasi yang benar-benar merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 . Sebaran Pemilih Etnis Lampung dan Jawa pada survey Pemilihan Bupati Way Kanan Bulan September 2015

No	Kecamatan	PEMILIH LAMPUNG	37,16%	PEMILIH JAWA	28,39%		
		Bustami - Adinata	R.Adipati S – Edward	E Sampel Etnis Lampung	Bustami - Adinata	R Adipati-Edward	E Sampel Etnis Jawa
1.	Blambang Umpu	18 (56,2%)	14 (43,8%)	32	15 (57,7%)	11 (42,3%)	26
2.	Banjit	10 (40,8%)	16 (59,2%)	27	7 (33,3%)	14 (66,4%)	21
3.	Baradatu	10 (41,6%)	13 (54,1%)	24	7 (38,9%)	11 (61,1%)	18
4.	Pakuan Ratu	12 (54,5%)	9 (40,9%)	22	10 (58,8%)	6 (35,3%)	17
5.	Negara Batin	8 (40%)	10 (50%)	20	6 (37,5%)	9 (56,2%)	16
6.	Negeri Agung	12 (60%)	8 (40%)	20	9 (60%)	6 (40%)	15
7.	Kasui	8 (42,1%)	7 (36,8%)	19	6 (42,9)	5 (35,7%)	14
8.	Gunung Labuan	6 (37,5%)	10 (62,5%)	16	5 (41,6%)	7 (58,4%)	12
9.	Bumi Agung	2 (14,3%)	6 (42,8%)	14	2 (18,2%)	4 (36,4%)	11
10.	Way Tuba	6 (50%)	6 (50%)	12	5 (55,5%)	4 (44,5%)	9
11.	Rebang Tangkas	6 (50%)	5 (41,7%)	12	5 (55,5%)	3 (33,3%)	9
12.	Buay Bahuga	5 (45,4%)	3 (27,3%)	11	4 (50%)	2 (25%)	8
13.	Negeri Besar	3 (27,3%)	5 (45,4%)	11	2 (25%)	4 (50%)	8
14.	Bahuga	2 (33,3%)	4 (66,7%)	6	2 (50%)	2 (50%)	4
	TOTAL	108	116	246	85	88	188
	%	43,9%	47,1 %	100%	45,2%	46,8%	100%

Tabel 2. Tabel responden pemilih perempuan, dengan pertanyaan pengaruh peran istri terhadap orientasi memilih pemilih etnis Jawa dan Lampung pada Survey Bulan September 2015.

No	Nama Kecamatan	Bustami Zainudin - Adinata	Raden Adipati Surya - Edward	Belum Memilih (<i>Swing Voters</i>)	Menjawab Peran Istri	Jumlah Sampel
1.	Blambangan Umpu	23 (52,3%)	21 (47,7%)		7 (22,5%)	44
2.	Banjit	12 (37,5%)	19 (59,4%)	1 (3,1%)	5 (16,1%)	32
3.	Baradatu	14 (46,7%)	16 (53,3%)		3 (9,7%)	30
4.	Pakuan Ratu	22 (81,5%)	5 (18,5%)		2 (6,5%)	27
5.	Negara Batin	18 (51,4%)	15 (42,9%)	2 (5,7%)	3 (9,7%)	35
6.	Negeri Agung	14 (53,8%)	12 (46,1%)		2 (6,5%)	26
7.	Kasui	9 (50%)	6 (33,3%)	3 (16,6%)	1 (3,2%)	18
8.	Gunung Labuan	6 (26,1%)	17 (73,9%)		2 (6,5%)	23
9.	Bumi Agung	2 (13,3%)	6 (40%)	7 (46,6%)	1 (3,2%)	15
10.	Way Tuba	8 (42,1%)	10 (52,6%)	1 (5,3%)	2 (6,5%)	19
11.	Rebang Tangkas	8 (57,1%)	6 (42,9%)		1 (3,2%)	14
12.	Buay Bahuga	5 (38,5%)	4 (30,7%)	4 (30,7%)	1 (3,2%)	13
13.	Negeri Besar	1 (7,1%)	6 (42,9%)	7 (50%)	1 (3,2%)	14
14.	Bahuga	3 (37,5%)	5 (62,5%)		-	8
	TOTAL	145	148	25	31	318
	%	45,6%	46,5%	7,9%		100%

KESIMPULAN

Etnis dalam konteks pemilukada di Way Kanan masih kuat pengaruhnya pada pemilukada Way Kanan 2015, dengan dua etnis utama yaitu etnis Lampung dan Etnis Jawa Kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten Way Kanan masih dinilai biasa saja atau jalan di tempat tanpa ada perubahan yang berarti. Salah satu faktornya yaitu tidak meratanya pembangunan yang terjadi, bantuan – bantuan pemerintah banyak yang tidak sampai kepada mereka, kualitas pembangunannya buruk sehingga tidak tahan lama.

Persaingan ketat terjadi pada pasangan kandidat Bustami Zainudin-Adinata (281 responden memilih) dan pasangan kandidat Raden Adipati Surya-Edward (305 reponden memilih). Walaupun berdasarkan hasil survey bulan September 2015 pasangan Raden Adipati Surya-Edward unggul dengan selisih suara 3,62 %, masih ada sisa suara yang diperebutkan (*swing voters*), massa mengambang sebesar 11,48%.

Faktor peran istri-istri para kandidat pasangan calon terhadap para pemilih perempuan, dengan etnis Lampung dan Jawa bervariasi berdasarkan tabel 2, namun secara keseluruhan peran para istri untuk mempengaruhi pemilih perempuan dengan etnis Jawa dan Lampung tidak terlalu signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo., Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

-----, 1999. *Politik Indonesia*. Pustaka Jakarta. Jakarta
Haboddin, Muhtar. 2007. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya: Malang
Hamid, S. Edy.(ed). 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta : UII Press
Kantaprawira. 1995. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo
Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma. Jakarta
-----, 1997. *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta : CSIS
Liliweri, Alo Prof. Dr., M.S. 2005. *Prasangka dan Konflik*. LKIS : Yogyakarta
Mandatory. 2005. *Politik Perlawanan*. IRE : Yogyakarta
Mutakin, Awan.(dkk). 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. PT Genesindo
Prajarta Dirdjosanjata dan Nico L Kana (Penyunting). 2006. *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Pustaka Percik. Yogyakarta
Rahman, A., H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
Rudini. 1991. *Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta
Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu*

- Mengawal Demokrasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press: Semarang
- Sudikin dan Mundir. 2005. *Metode Penelitian*. Insan Cendekia. Surabaya
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta
- Silalahi, Dr. Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Jakarta
- Soekanto, Soerjono .1982. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Press: Jakarta

PERAN KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI (KOIPEDE) PROVINSI JAMBI MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGHADAPI PEMILU 2019

Mochammad Farisi, Nopyandri

Kedua Penulis adalah Staf Pengajar pada Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi
Email siraf_faris@yahoo.com.

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOIPEDE) Provinsi Jambi Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pemilu 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desain pengembangan KOIPEDE Prov. Jambi dan bagaimana strategi membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi. Penelitian ini memfokuskan pada perubahan paradigma masyarakat bahwa KPU hanya penyelenggara bukan penentu, dimana penentunya adalah rakyat. Disinilah peran besar KOIPEDE menjadi ujung tombak perubahan paradigma itu dengan cara mengdukasi komunitas-komunitas masyarakat bahwa urusan pemilu tidak semata urusan KPU tapi adalah urusan rakyat. Maka tugas dari KOIPEDE memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yaitu sebuah Komunitas yang peduli terhadap urusan pemilu dan demokrasi, serta memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan komunitas ini dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi seperti; keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan pemantauan pemilihan. Kata kunci: KOIPEDE, partisipasi masyarakat, pemilu dan demokrasi

abstract

This research is entitled "The Role of Election and Democracy Concerned Communities (KOIPEDE) Jambi Province in Building Community Participation in Facing 2019 Election". The purpose of this study was to find out how the development of KOIPEDE Prov. Jambi and how to develop community communities to have knowledge, awareness and skills about elections and democracy. This study focuses on changing the paradigm of the community that the KPU is only the organizer not the determinant, where the determination is the people. This is where the big role of KOIPEDE is the spearhead of the paradigm change by educating community communities that election affairs are not merely the affairs of the KPU but are the affairs of the people. So the task of KOIPEDE provides education about elections and democracy. This

research is a qualitative descriptive study that is a method of researching an object that is a community that cares about election affairs and democracy, and provides a systematic factual and accurate description or description of activities or activities carried out by this community in building community awareness and participation to have knowledge, awareness and skills about elections and democracy such as; community involvement in organizing elections, monitoring at each stage of the election, socializing elections, political education for voters and monitoring elections.

Keywords: KOIPEDE, community participation, elections and democracy

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan nyata kehendak demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Maka rakyat seyogyanya terlibat aktif, seaktif-aktifnya dalam melakukan proses demokrasi itu. Dengan hipotesa ini, rakyat dipastikan sebagai penentu utama sukses atau tidaknya segala proses demokrasi yang berlangsung.

Dibentuknya oleh negara beberapa institusi penyelenggara pemilu melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanyalah merupakan ‘*organizer*’ yang ditugasi Negara untuk membantu rakyat demi mendapatkan kedaulatannya. Sekali lagi, membantu rakyat. Jika demikian, para penyelenggara pemilu tidak boleh ‘memisahkan diri’ dari rakyat. Wajib hukumnya para penyelenggara pemilu melibatkan rakyat dalam setiap tugas yang diberikan karena yang punya ‘hajatan’ adalah rakyat; tentunya

dengan aturan main sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berangkat dari paradigma inilah agaknya para penyelenggara pemilu khususnya KPU saat ini benar-benar menginginkan partisipasi aktif setiap warga Negara di republik ini. Hal ini tergambar dari beberapa kegiatan KPU di seluruh Indonesia tidak lagi hanya berkutat dengan persoalan ‘teknis’ kepiluan tetapi mulai beranjak pada pemberdayaan peran masyarakat luas.

KPU betul-betul menyadari bahwa segala urusan teknis dapat diselesaikan dengan baik dan mudah jika semua elemen masyarakat terlibat didalamnya. Dan sebaliknya, urusan-urusan teknis penyelenggaraan pemilu akan sangat berat jika KPU gagal meyakinkan masyarakat bahwa sesungguhnya pelaksanaan pemilihan umum (termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah) adalah kehendak rakyat bukan kehendak KPU. Maka tugas ‘berat’ KPU saat ini adalah merubah pola pikir masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam setiap detail kepiluan yang berlangsung.

Salah satu bentuk nyata KPU melibatkan rakyat adalah diinisiasinya pembentukan Komunitas Peduli Pemilu

dan Demokrasi (KOPIPEDE) yang di dalamnya melibatkan semua unsur masyarakat. Tentunya hal ini adalah langkah positif dan konstruktif. Beberapa urgensi dibentuknya komunitas ini adalah;

Pertama, agen demokrasi. Harus diyakini bahwa KPU tidak akan mampu masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Maka KPU harus menempatkan agen-nya sebagai 'penyambung lidah' untuk mentransfer segala informasi yang diberikan. Contoh, tidak mungkin KPU akan berhubungan langsung 'dor to dor' kepada seluruh tukang ojek di Provinsi Jambi untuk mensosialisasikan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Maka dengan komunitas ini, yang di dalamnya ada perwakilan tukang ojek, merekalah yang akan berbicara dengan 'bahasa' kaumnya sendiri. Maka anggota KOPIPEDE adalah agen-agen demokrasi yang akan sangat efektif untuk menyentuh setiap lapisan masyarakat sampai kepada lapisan terbawah.

Kedua, perubahan paradigma. Paradigma yang terbangun di tengah masyarakat selama ini bahwa urusan pemilu itu 'hanya' urusan KPU. Jadi jika terjadi ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah murni 'dosa' KPU. Bahkan, jika tingkat partisipasi masyarakat menurun pun juga menjadi gambaran ketidakberesan KPU. Padahal, yang memberikan partisipasi itu adalah rakyat sendiri.

Ini adalah sebuah paradigma yang harus diubah. KPU hanya penyelenggara

bukan penentu. Penentu adalah rakyat. Merubah sebuah paradigma memang tidak mudah; membutuhkan waktu dan memerlukan energy besar dengan keterlibatan semua unsur. Sulit bukan berarti tidak bisa. Di sinilah salah satu urgensi KOPIPEDE yang akan menjadi ujung tombak perubahan paradigma itu. Komunitas ini akan terus mengedukasi kelompoknya dan masyarakat bahwa urusan pemilu tidak semata urusan KPU tapi adalah urusan rakyat. Jika masyarakat memerlukan pendidikan politik maka komunitas ini adalah guru politiknya.

Ketiga, forum komunikasi. Berbeda-beda namun tetap satu jua; Indonesia. Profesi boleh apa saja, tukang ojek, pedagang, praktisi seni, akademisi, birokrat, guru, pemuda, pelajar, aktivis, petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya namun memiliki satu tujuan berbuat untuk bangsa. Seyogyanyalah, perbedaan profesi tidak boleh dijadikan pemisah hakiki anak negeri. Maka sangat dibutuhkan wadah untuk saling berdiskusi dan bertukar informasi sehingga keberadaan KOPIPEDE menjadi sangat penting sebagai pengikat tali silaturahmi semua kalangan.

Akhirnya, jika rakyat betul-betul ingin mendapatkan kedaulatannya dengan seluas-luasnya, maka jangan serahkan prosesnya hanya kepada penyelenggara pemilu. Rakyat harus ikut berjuang dan memperjuangkannya! Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi (KOPIPEDE) menjadi sangat penting karena komunitas ini akan menjadi wadah perjuangan rakyat untuk mendapatkan kedaulatannya.

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah desain pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi (KOIPEDE) Prov. Jambi ?
2. Bagaimanakah strategi KOIPEDE membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi ?

Keutamaan penelitian

Adapun keutamaan dari penelitian ini adalah mengetahui desain pengembangan KOIPEDE Prov. Jambi dan bagaimana strateginya dalam membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan tercipta sebuah modul dalam membangun kompetensi dasar kepelumutan untuk sebuah komunitas yang disusun untuk menjadi pegangan bagi komunitas apapun yang ingin mendedikasikan dirinya untuk pembangunan demokrasi dan kepelumutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOIPEDE) Prov. Jambi

KOIPEDE Prov. Jambi adalah sebuah Komunitas yang melakukan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. KOIPEDE melibatkan peran serta

komunitas-komunitas masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka memberikan pendidikan mengenai kepelumutan atau sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi dengan membentuk komunitas-komunitas peduli pemilu di segmen-segmen tertentu. KOIPEDE menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. (Paparan Komisioner KPU RI, Jambore Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Sentul Bogor 2017)

KOIPEDE lahir berlatarbelakang dari Strategi KPU RI untuk meningkatkan partisipasi pemilih, untuk itu setiap KPU Provinsi diwajibkan membuat acara Kursus Kepelumutan. Di Prov. Jambi dilaksanakan tanggal 6-7 Sept 2016, output dari kursus tersebut adalah terbentuknya sebuah komunitas peduli pemilu dan demokrasi yang disingkat menjadi KOIPEDE. KOIPEDE merupakan ikhtiar KPU untuk melahirkan embrio komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi. Embrio ini kemudian diharapkan tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam jangka panjang, entitas ini dapat menjadi mitra strategis KPU dan masyarakat untuk bersama-sama membangun mutu pemilu dan demokrasi. Adanya entitas masyarakat yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi adalah sangat penting bagi dinamika pematangan demokrasi.

Entitas ini dapat membangun wacana, menggerakkan partisipasi dan melahirkan kritik – autokritik tentang narasi-narasi besar pemilu dan demokrasi. Eksistensi entitas ini akan memperkuat sisi masyarakat sipil untuk berkontribusi secara langsung bagi penguatan demokrasi. Tingkat kematangan masyarakat antar daerah untuk berdemokrasi secara baik terjadi ketimpangan. Ini bukan kondisi yang ideal bagi perkembangan demokrasi secara keseluruhan pada sebuah bangsa. Dengan demikian, program pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi ini sangat penting untuk dilakukan. Program ini akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan proponen pada isu tersebut di setiap wilayah Indonesia. Akhirnya, mutu pemilu dan demokrasi semakin baik. (Wawancara dengan Bahren Nurdin, MA, Ketua KOPIPEDE Prov. Jambi, 27 Agustus 2018)

Prinsip dasar partisipasi masyarakat

Pemilihan umum merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah di dalam Negara hukum dan menganut paham demokrasi. Melalui pemilu, rotasi kekuasaan penyelenggara Negara bisa dijalankan. Rotasi kekuasaan inilah yang akan menjadi hasil proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu juga memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, para penyelenggara Negara merupakan pengemban mandat

rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat.

Pemilu merupakan siklus pergantian kepemimpinan dan sebagai sarana bagi masyarakat memberikan kedaulatannya untuk menentukan pemimpin dan membentuk pemerintahan yang berkualitas. Oleh karena itu hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi makna pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat, pemilih dan warga Negara. Sebab masyarakatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan, yang karena kesepakatan bersama justru memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, peran masyarakat, pemilih dan warga Negara tidak bisa diabaikan. (UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat 2, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD)

Partisipasi selalu menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan kerja bagi penyelenggara pemilu. Tiga kali pemilu pasca-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 92,6%. Penurunan tingkat partisipasi terjadi pada Pemilu 2004 yang ada pada kisaran 84,1%. Demikian juga pada Pemilu 2009, penurunan tingkat partisipasi terjadi, dimana hanya 70,9%. Jika diperhatikan terjadi tingkat penurunan yang konstan di kisaran 8-10%. Peningkatan tingkat partisipasi memang terjadi pada pemilu 2014, sebanyak 75,1% pemilih

menggunakan hak pilihnya. Namun angka tersebut masih dibawah tingkat partisipasi Pemilu 2004 dan 1999. (KPU RI, membangun kompetensi dasar kepiluan untuk komunitas)

Partisipasi dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menganggap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 448 bahwa pemilu dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dimaksud antara lain dalam bentuk sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih. Sedangkan bentuk kegiatannya antara lain bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Selanjutnya lebih teknis lagi KPU mengeluarkan PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang menarik dalam PKPU ini dalam pasal 4 ayat (1) menjadikan pemilih berbasis sebagai sasaran utama. Pemilih berbasis artinya pemilih yang memiliki basis, jaringan yang luas atau komunitas.

Pemilih berbasis sebagaimana yang dimaksud, meliputi : keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen). Basis-basis masyarakat tersebut menuntut KPU harus mampu berkreasi dan menemukan

instrumen pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang kreatif, efektif, menyenangkan dan kekinian. Istilah yang dikenal *electiontainment*. KOIPEDE yang di launching oleh KPU Prov Jambi merupakan salah satu jawaban sosialisasi pemilu zaman Now. (wawancara dengan Desy Arianto, Komisioner KPU Prov. Jambi Divisi Sosialisasi, 24 Maret 2018)

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui bagaimana desain pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi (KOIPEDE) Prov. Jambi (2). Untuk mengetahui bagaimanakah strategi KOIPEDE membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dalam merumuskan desain pengembangan komunitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2019. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi guna memahami persoalan yang sama, khususnya berkaitan peningkatan pengetahuan, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif di Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan sebuah Komunitas yang peduli terhadap urusan pemilu dan demokrasi, serta memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan komunitas ini dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilannya tentang pemilu dan demokrasi seperti; keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan pemantauan pemilihan.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nawawi dan Martini (1996: 73). Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Mukhtar (2013: 28).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah KPU Provinsi Jambi dan KOIPEDE Prov. Jambi dimana lembaga dan komunitas tersebut menjadi kunci dari penelitian yang akan dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka (library research), simak, dan catat. Sebagai instrumen utamanya mengumpulkan informasi atau data dari tokoh kunci yaitu komisioner KPU dan Ketua serta seluruh anggota KOIPEDE. Adapun langkah pengumpulan data penelitian, penulis mengacu pendapat Rafiek (2013: 4) yakni (1) Membaca karya sastra, (2) Menguasai teori, (3) Menguasai metode, (4) Mencari dan menemukan data, (5) Menganalisis data yang ditemukan secara mendalam, (6) Melakukan perbaikan secara menyeluruh, (7) Membuat simpulan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis secara langsung terhadap lembaga KPU dan KOIPEDE melalui proses (1) data reduction, yaitu penulis memilih dan memilah-milah data yang akan dianalisis berupa kata, kalimat, atau ungkapan sesuai dengan metode penokohan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung; (2) data display, yaitu penulis menampilkan data yang telah dipilih dan dipilah-pilah dan menganalisis jenis metode penokohnya; (3) verification, yaitu penulis menyimpulkan hasil analisis terhadap penggunaan metode penokohan yang dipakai (Mukhtar, 2013: 135)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu & Demokrasi (KOIPEDE) Prov. Jambi

KPU RI mempunyai visi menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas. Untuk mewujudkan visi tersebut KPU RI mempunyai 7 misi yaitu; (1). Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional, (2). menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif, (3). meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat, (4). meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, (5). memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan, (6). meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu, (7). mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Implementasi dari misi keempat diatas adalah dengan membentuk

Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) sebutan untuk komunitas yang berada di semua Provinsi di Indonesia, dan khusus di Provinsi Jambi diberi nama dengan akronim KOIPEDE yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Prinsip dasar KOIPEDE dalam melakukan gerakan social kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi adalah Kemandirian, netralitas dan kesukarelawanan. Dari tiga prinsip tersebut KOIPEDE bergerak dengan tujuan; (1). Membangkitkan kesukarelawanan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi, (2). Mentransformasikan prinsip, nilai, perilaku dan budaya demokrasi di tengah-tengah masyarakat, (3). Mendorong perubahan pola pikir, sikap dan pola tindak masyarakat menjadi lebih produktif, mandiri, dan rasional dalam menyikapi aktivitas pemilu dan demokrasi, (4). Meningkatkan kapasitas dan jangkauan sosialisasi, penyebaran informasi dan pendidikan pemilih, (5). Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu/pemilihan.

Table 1. Desain pengembangan KOIPEDE mulai tahun 2017 sampai 2021

	Sasaran Kerja
2017	1. Terbentuknya Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di setiap provinsi. 2. Penanaman prinsip, nilai, orientasi dan penguatan kapasitas anggota komunitas. 3. Memperkuat team work di antara sesama anggota komunitas.
2018	1. Terbentuknya embrio Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di setiap kabupaten/kota. 2. Penanaman prinsip, nilai, orientasi dan penguatan kapasitas anggota komunitas. 3. Memperkuat team work di antara sesama anggota komunitas dan menginisiasi terbentuknya simpul gerakan antar komunitas. 4. Komunitas menentukan kelompok sasaran, menyusun materi, metode, fase, waktu dan lokasi pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi dan pendidikan pemilih. 5. Komunitas mulai melakukan fase pengenalan tentang pemilu dan demokrasi kepada kelompok sasaran.
2019	1. Meningkatnya intensitas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok sasaran. 2. Meluasnya kelompok sasaran yang menjadi target sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2020	1. Komunitas yang terbentuk sudah berbadan hukum. 2. Komunitas mampu melahirkan cetak biru sosialisasi dan pendidikan pemilih di komunitasnya.
2021	1. Terbentuknya komunitas yang mandiri untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. 2. Terjalannya networking di antara sesama komunitas untuk memperkuat dan memperluas basis gerakan.

Sumber: KPU RI, Jambore Komunitas Demokrasi, Sentul, 16 Agustus 2017

Strategi KOIPEDE membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi.

Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis komunitas yang dilakukan KOIPEDE adalah melalui tiga metode yaitu;

1. Komunikasi Tatap Muka (*Face to Face Communication*)

KOIPEDE melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan basis-basis masyarakat sesuai dengan pembagian segmen-segmen, berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan:

a. Membentuk KOIPEDE di 10 Kabupaten/Kota

Tabel 2. Data pembentukan KOIPEDE kab/kota di Prov. Jambi

Kab. Tebo	10 Februari 2017
Kota Jambi	30 September 2017
Kab. Tanjung Jabung Barat	31 Oktober 2017
Kab. Muaro Jambi	04 November 2017
Kab. Batanghari	05 November 2017
Kab. Tanjung Jabung Timur	15 November 2017
Kab. Sarolangun	16 November 2017
Kab. Bungo	20 November 2017
Kota Sungai Penuh	09 Desember 2017
Kab. Merangin	20 Desember 2017
Chaper Unja	15 April 2018
Chapter Uin STS Jambi	15 April 2018

Sumber data, File Arsip kegiatan KOIPEDE di Rumah Komunitas (RUTAS)

b. Melaksanakan berbagai macam kegiatan seminar, diskusi, sosialisasi, dll

Table 3. Data kegiatan seminar, diskusi dan sosialisasi KOIPEDE

Bln/Thn	Kegiatan
08/2018	Workshop Perempuan dan Politik DPW Patai Amanat Nasioanl (PAN) Prov. Jambi
08/2018	Dialog Kebangsaan “Umat Cerdas Berdemokrasi” bersama Front Pembela Islam (FPI) Prov. Jambi
08/2018	Menerima Penghargaan dari Kapolda Jambi KOIPEDE sebagai Komunitas yang mendukung tupoksi Kepolisian dalam menciptakan situasi kondusif Pilkada Serentak 2018
07/2018	Pendidikan Politik Nilai-nilai Demokrasi di Pelatihan Paskibraka Prov. Jambi
05/2018	Tatap Muka Forkompinda, tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda jelang Pilkada Serentak 2018
05/2018	Seminar “Penguatan Peran Mahasiswa sebagai Pemantau Partisipatif Pilkada 2018” bersama 10 BEM Universitas
05/2018	Pendidikan Politik “Sosialisasi dan Simulasi Pemungutan Suara bagi Disabilitas”
05/2018	Pendidikan Politik “Penguatan Peran Ustad dan Penceramah Agama dalam menolak Money Politik”
04/2018	Pendidikan Politik Pemula Ikatan Pelajar Muhammadiyah
04/2018	Seminar Aktualisasi Peran Mahasiswa dalam Mensukseskan Pemilu 2019, BEM STIT Darul Ulum Kab. Sarolangun
04/2018	Retorika Politik Pelatihan Kader Madya DPD Partai Perindo

	Prov. Jambi
03/2018	Pendidikan Politik Pemilih Pemula Ikatan Pemuda, Pemplajar dan Mahasiswa Bahar, Kab. Muaro Jambi
02/2018	FGD Pilkada Damai kerjasama Polda Jambi dengan Fisipol Univ. Jambi
02/2018	Diskusi, Deklarasi dan Aksi Mahasiswa Tolak Money Politik di Universitas Jambi
02/2018	Seminar “menguatkan peran perempuan dalam kontestasi politik local”
01/2018	Seminar “Menguatkan Peran Komunitas-Komunitas Mahasiswa sebagai Pemantau Pilkada Kota Jambi” diselenggarakan oleh FISIPOL Univ. Jambi

Sumber data, File Arsip kegiatan KOIPEDE di Rumah Komunitas (RUTAS)

2. Komunikasi Menggunakan Media (*Mediated Communication*)

Table 3. Data kegiatan KOIPEDE dengan media

Bln/thn	Kegiatan
07/2018	Dialog Perspektif di TVRI Jambi tema “Caleg Kapabel atau Populer?”
06/2018	Dialog Perspektif TVRI Jambi tema “Pengawasan Partisipatif Pilkada 2018)
05/2018	Dialog Perspektif TVRI Jambi tema “Tahapan Pilkada 2018”
04/2018	Dialog Perspektif TVRI Jambi “Cerdas memilih Caleg Pemilu 2019”
04/2018	Dialog TVRI Jambi “Evaluasi Debat Pilwako Jambi sesi 1”
03/2018	Dialog TVRI Jambi “Regulasi Debat Pilkada”
03/2018	Dialog TVRI Jambi “Menegaskan Integritas Penyelenggara Pemilu”

Sumber data, File Arsip kegiatan KOIPEDE di Rumah Komunitas (RUTAS)

Anggota KOIPEDE juga aktif menjadi narasumber di RRI, JekTV serta menjadi penulis Opini diberbagai media cetak dan online seperti; metrojambi.com, jambione.com, kenali.com, jamberita.com, Jambi Ekspres, Jambi Independent, Tribun Jambi dan lain-lain. Selain itu KOIPEDE juga aktif berkampanye di facebook, instagram dan media whatsapp serta youtube.

3. Mobilisasi Massa (*Mass Mobilization*)

Table 4. Data kegiatan mobilisasi massa

Bln/thn	Kegiatan
09/2018	Kopipede aksi simpatik dan deklarasi #2019pemiludamai
08/2018	Kopipede dan KPU Prov. Jambi sosialisasi Sidalih3 di Carfreeday Kota Jambi
06/2018	Ngabuburit asik sambil sosialisasi pemilih cerdas
06/2018	Road Show Keluarga Sadar Pilkada
05/2018	Aksi simpatik sosialisasi pilkada beradab
05/2018	Jambore Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi ke1
04/2018	Pendidikan Politik Aksi Simpatik Pilkada Beradab
03/2018	Pawai Sosialisasi 14 Parpol Peserta Pemilu 2019
02/2018	Deklarasi Kampanye Damai Pilwako Jambi
03/2018	Pendidikan Politik Mahasiswa Fisipol ke RPP Kab. Batang Hari

Sumber data, File Arsip kegiatan KOPIPEDE di Rumah Komunitas (RUTAS)

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Kopipede adalah bagian dari misi KPU RI untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Tujuan KOPIPEDE adalah membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi, mentransformasikan prinsip, nilai, perilaku dan budaya demokrasi di tengah-tengah masyarakat, Mendorong perubahan pola pikir, sikap dan pola tindak masyarakat menjadi lebih produktif, mandiri, dan rasional dalam menyikapi aktivitas pemilu dan demokrasi dan meningkatkan kapasitas dan jangkauan sosialisasi, penyebaran informasi dan pendidikan pemilih.

Saran

Mengembangkan kopipede sampai ke pelosok –pelosok kabupaten, kecamatan dan desa , membangun sinergi aktif dengan penyelenggara pemilu dan semua stakeholder masyarakat untuk terus memberikan pendidikan dan sosialisasi bagi masyarakat untuk cerdas berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA. Buku

- Direktorat Pengelolaan Limbah dan B3
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 2000, *Pengelolaan Ekspor Impor Limbah dan Pelaksanaan Konvensi Basel*, Jakarta.
- Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhadam labolo, 2015, *Partai Politik dan System Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, KPU RI, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016, *Tingkat Politik Melek Warga Dalam Pemilu 2014*, KPU RI, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016, *Perilaku*

Memilih Dalam Pemilu 2014, KPU RI, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2016, *Kesukarelawanan Warga Dalam Politik*, KPU RI, Jakarta.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali

ANALISA KREDIBILITAS MUSTAFA-AJA PADA PEMBERITAAN MEDIA SEBELUM DAN SESUDAH KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KPK

(Analisis Framing Pemberitaan Calon Gubernur Lampung Pada Portal Berita Online Radar Lampung Online dan Lampost.co Periode Januari - April 2018)

ABDURRAHMAN

Bekerja di Industri Kreatif Universitas Bandar Lampung

Email : alekabdurrahman12@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Lampung akan melaksanakan pemilihan umum kepada daerah pada 2018. Salah satu calon gubernur Lampung, Mustafa memiliki terobosan program kerja Kampung Creative Entrepreneur (KECe). Memasuki februari 2018, Mustafa terkena kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun Anggaran 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kredibilitas Mustafa-Aja yang dilihat dari pemberitaan di media online Radar Lampung Online dan Lampost.co periode pemberitaan Januari hingga April 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah Radar Lampung Online mengkonstruksikan kredibilitas pemberitaan sangat kurang jumlah kata dalam menuliskan pemberitaan Mustafa. Pembungkahan pemberitaan yang dilakukan Lampost.co dalam mengkonstruksikan kredibilitas sosok Mustafa sangat konsisten. Mustofa sangat menjaga hubungan baik dengan media Lampost.co terutama untuk mempertahankan dan menjaga kredibilitasnya di masyarakat Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Mustafa Aja, Kampung Creative Entrepreneur (KECe), Media Online, Pembungkahan Berita

ABSTRACT

Lampung Province will hold elections to the region by 2018. One candidate for Lampung governor, Mustafa has a breakthrough work program creative village entrepreneur (KECe). Entering february 2018, Mustafa was hit by a bribery case of regional loan approval for the Central Lampung Budget of 2018. This research uses framing analysis method of Pan and Kosicki. The research results found is Radar Lampung Online construct the credibility of the news is very less the number of words in writing Mustafa coverage. The framing of news made by Lampost.co in constructing the credibility of the Mustafa figure is very consistent. Mustofa is maintaining good relations with Lampost.co media primarily to maintain and maintain credibility in the community of Lampung Province.

Keywords: Mustafa Aja, Creative Village Entrepreneur (KECe), Online Media,
Framing News

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) kepala daerah yang dilaksanakan pada 2018. Calon gubenur dan wakil gubernur Lampung mulai menampilkan terobosan baru dalam bentuk program kerja. Program kerja yang berbeda dengan para pasangan calon lain seperti Kampung *Creative Entrepreneur* (KECe) dari calon gubernur dan wakil gubernur Mustofa-Aja. Program KECe menjadi sebuah solusi untuk memberikan terobosan baru menyongsong pemilu 2018. Firmanzah (dalam Adhitama, 2016:28) persaingan untuk memperebutkan hati dan perhatian masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh partai politik dan kontestan. Untuk melakukannya mereka membutuhkan media dan pers, cakupan penyebaran informasi, program kerja dan produk politik lainnya akan menjadi lebih efektif sehingga penyebarannya menjadi lebih luas dan komprehensif.

Upaya menarik rasa simpati dari masyarakat Provinsi Lampung dilakukan dengan gaya kampanye yang berkonsep media baru. Konsep kampanye yang mengedepankan teknologi dan modern memberikan kesempatan masyarakat Lampung untuk aktif berinteraksi melalui media online dan media sosial. Kampanye politik menggunakan media sosial dan media online berhasil meningkatkan elektabilitas dan popularitas Mustofa-Aja. Saluran komunikasi politik sangat beragam pada dasarnya saluran komunikasi politik sama dengan saluran komunikasi umum. Saluran komunikasi politik adalah yang memudahkan

penyampaian pesan politik. Saluran komunikasi politik tidak hanya mencakup alat, sarana dan mekanisme seperti radio, televisi dan media sosial. Manusia sebagai otak perumusan pesan politik melalui sarana yang ada di media massa (Nimmo, 2001:166).

Menjelang pemilu kepala daerah Provinsi Lampung 2018 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Mustofa-Aja mendapatkan sebuah permasalahan pidana. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan calon gubernur Lampung, Mustofa. Keterlibatan Mustofa dalam permasalahan pidana akan berdampak pemberitaan di media massa dan media baru terutama tingkat kredibilitas hingga perolehan dukungan pada pemilu kepada Daerah Provinsi Lampung 2018. Hamad (dalam Rahadi, 2017:51) media berperan dalam melakukan konstruksi peristiwa politik yang bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media mengkonstruksi berita politik.

Media pemberitaan online yang dikaji dalam penelitian, yakni Radar Lampung Online dan Lampost.co. Dua portal berita online ini sudah banyak dikenal masyarakat Provinsi Lampung sebagai media online terdepan dalam penayangan berita-berita baru. Angka kunjungan pembaca di Radar Lampung Online berhasil menjadikan situs ini mencapai peringkat 1.006 di Indonesia dan peringkat 71.294 di Global sedangkan Lampost.co berhasil mencapai peringkat 6.585 di Indonesia

dan 353.078 di Global (Alexa Internet, 2018). Jurnalisme online merupakan tipe baru jurnalistik karena sejumlah fitur dan karakteristik berbeda-beda dari jurnalismen konvensional. Fitur-fitur uniknya yang mengemuka adalah teknologinya. Teknologi jurnalisme online menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita atau dikenal *contextualized journalism*. *Contextualized journalism* merupakan upaya mengintegrasikan tiga fitur komunikasi, yakni multimedia, interaktif dan hipertekstual (Santana, 2005:137).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis framing pemberitaan tokoh politik di media online diantaranya, Kharisma (2017:168-179) yang melakukan penelitian tentang “Pembingkaihan Pernyataan Gubernur Jawa Barat Pada Pemberhentian Kebaktian Kebangunan Rohani Dalam Media Daring”. Hasil penelitian menunjukan Kompas.com berupaya mengonstruksi pesan yang membuat khalayak sedikit meredam pada peristiwa KKR di Sabuga, berbeda halnya dengan Beritasatu.com yang justru dapat berpotensi semakin membangkitkan emosi negatif khalayak kepada Gubernur Jabar.

Selanjutnya, Astuti (2016:1-20) melakukan penelitian tentang “Konstruksi Sosial Media Terhadap Kekuatan Personal Branding Tri Rismaharini dalam Proses Komunikasi Politik Kontemporer (Analisis Framing Pemberitaan di Media Online Republika.co.id dan Tempo.com)”. Hasil penelitian yang ditemukan adalah

kedua media tersebut mengonstruksi dan membingkai sosok Risma sebagai tokoh politik perempuan yang memiliki *personal branding* yang baik di mata publik dengan kepribadian yang ramah dan disiplin serta peka terhadap realitas sosial di sekitarnya.

Selain itu, Atmadja (2014:1-11) melakukan penelitian tentang “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Online”. Hasil penelitian ini yang ditemukan adalah sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikonstruksi media online sebagai pemimpin politik sekaligus pemerintahan yang bijaksana dan sudah biasa menghadapi isu SARA. Peran media online sangat besar terutama memberikan citra yang baik dan tegas.

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Pan dan Kosicki (dalam Rahadi, 2017:53) menonjolkan pemaknaan atas realitas harus memaknai strategi kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lain untuk mengungkapkan pemaknaan sebuah pemberitaan. Data dalam penelitian ini berasal berita di Radar Lampung Online dan Lampost.co. Berdasarkan pemberitaan yang dimuat dua media online ini periode Januari hingga April 2018, peneliti menemukan delapan pemberitaan. Peneliti merumuskan masalah penelitian diatas, yaitu Bagaimana Pembingkaihan pemberitaan yang dilakukan media online pada kredibilitas Mustafa Aja di Media Online Radar Lampung Online dan

Lampost.co periode pemberitaan Januari hingga April 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan model analisis framing Zhongdang dan Kosicki. Dari dua media online, Radar Lampung Online dan Lampost.co peneliti menemukan delapan pemberitaan. Dari delapan pemberitaan ini, peneliti akan menganalisis menggunakan empat struktur, yakni sintaksis, skrip, tematik dan retorik.

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 JANUARI 2018

Hussein (2011:127) struktur sintaksis berhubungan dengan jurnalis terutama dalam menyusun peristiwa kedalam bentuk berita. Struktur sintaksisnya, yakni Mustafa Jajuli Dideklarasikan. *Lead* berita dituliskan “radarlampung.co.id - Calon gubernur Lampung Mustafa berpasangan dengan Ahmad Jajuli sebagai calon wakil gubernur dideklarasikan oleh DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta. Latar informasi pembacaan ikrar dan pakta integritas itu dipandu oleh Ketua Majelis Syura, Presiden PKS, dan Sekjen PKS. Sementara itu, kutipan sumber Habib Salim Segaf Al Jufri “Siap mengerahkan segala kekuasaan dan daya upaya yang dimiliki untuk berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2018,” kata Habib. Selain itu, dalam aspek sintaksis terdapat unsur penutup, yakni usai dibacakan, para calon menandatangani pakta integritas

untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada DPP PKS.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 JANUARI 2018

Model analisis framing Zhongdang dan Kosicki memiliki enam aspek di struktur skrip (Hussein, 2011:130). Struktur skrip Who, yakni Mustafa dan Ahmad Jajuli. Selanjutnya, struktur skrip What, yaitu calon gubernur Lampung Mustafa dan calon wakil gubernur Lampung Ahmad Jajuli dideklarasikan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sementara itu, struktur skrip When dan Where, yakni 4/1/2018 dan Hotel Bidakara Jakarta. Selain itu, struktur why dan how, yaitu deklarasi sekaligus pembacaan ikrar dan pakta integritas menjadi langkah awal untuk mempersiapkan kemenangan.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 JANUARI 2018

Unsur Tematik merupakan proses tekstual yang ditampilkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat memberikan perhatian (Hussein, 2011:130). Struktur tematiknya pemberitaan terdapat lima paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat penguat deklarasi para calon untuk mengikuti pilkada serentak 2018, paragraf terakhir diperkuat dengan pernyataan Sekjen PKS untuk memenangkan Pilkada serentak 2018.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 JANUARI 2018

Struktur retorik merupakan sebuah cara jurnalis untuk memberi penekanan arti

tertentu dalam berita yang ditulisnya (Hussein, 2011:132). Struktur retorik, yakni kata “deklarasi” sebagai bentuk penjabaran judul dan didukung oleh foto pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli.

**Tabel 1. Analisis Framing Pemberitaan Radar Lampung Online
Berjudul Mustafa Jajuli Dideklarasikan pada 4 Januari
2018**

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Mustafa Jajuli Dideklarasikan
	Lead	Radarlampung.co.id-Calon gubernur Lampung Mustafa berpasangan dengan Ahmad Jajuli sebagai calon wakil gubernur dideklarasikan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1). Bupati Lampung Tengah dan Anggota Perwakilan Daerah (DPD) RI dideklarasikan bersama calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang disuung maupun didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membacakan ikrar kemenangan dan pakta integritas
	Latar Informasi	Pembacaan ikrar dan pakta integritas itu dipandu oleh Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal
	Kutipan Sumber	Setelah penyerahan SK, para calon dikumpulkan untuk mengucapkan ikrar kemenangan dan pakta integritas. “Siapa mengerahkan segala kekuasaan dan daya upaya yang dimiliki untuk berjuang memenangkan Pilkada Serentak 2018 bersama PKS dengan penuh kehormatan, keberkahan dan bermartabat,” kata Habib Salim diikuti seluruh calon yang hadir
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	Usai dibacakan, para calon menandatangani pakta integritas untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada DPP PKS
Struktur Skrip	What	Calon gubernur Lampung Mustafa dan calon wakil gubernur Lampung Ahmad Jajuli dideklarasikan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Bidakara, Jakarta.
	Who	Mustafa dan Ahmad Jajuli
	When	4/1/2018
	Where	Hotel Bidakara Jakarta

	Why	Deklarasi sekaligus pembacaan ikrar dan pakta integritas menjadi langkah awal untuk mempersiapkan kemenangan
	How	PKS siap mengerahkan segala kekuatan dan upaya untuk berjuang memenangkan pilkada serentak 2018 dengan penuh kehormatan, keberkahan dan bermartabat.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat lima paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat penguat tentang deklarasi para calon untuk mengikuti pilkada serentak 2018, paragraf terakhir diperkuat dengan pernyataan Sekejn PKS untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 dengan kehormatan, keberkahan dan martabat.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “deklarasi” sebagai bentuk penjabaran judul dan didukung oleh foto pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli.

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 16 JANUARI 2018

Eriyanto (2011:295) struktur sintaksis merupakan upaya untuk menyusun fakta. Struktur sintaksis, yakni Syekher Mania Selawat Bersama Mustafa dan Habib Syech. *Lead* “Lampost.co – Meski hujan puluhan ribu warga dan anggota syekher mania tetap semangat mengikuti selawat bersama Habib Syech Assegaf,”. Selanjutnya, latar informasi salawat bertujuan untuk kebaikan umat muslim di Lampung dan Indonesia pada umumnya. Sementara itu, kutipan sumber dari Habib Syech “Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud,” Ujarnya. Selain itu, dalam aspek sintaksis terdapat unsur penutup dilakukan pelantikan pengurus Syekher Mania Kabupaten Tulang bawang Barat yang dipimpin langsung Ustaz Ali Maksum.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 16 JANUARI 2018

Berita yang ditayangkan di Lampost.co periode 16 Januari 2018 memiliki struktur skrip Who, yakni Mustafa dan Habib Syech. Selanjutnya, struktur skrip What dari, yaitu Mustafa dan Habib Syech Gelar Selawat bersama Syekher Mania Lampung. Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang ditayangkan Lampost.co periode Januari 2018, yakni 16/1/2018 dan Lapangan Candra Kencana Kabupaten Tulangbawang Barat. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu Selawat bersama Habib Syech dilakukan untuk mendoakan Mustafa bisa memimpin Lampung dan Mustafa mengingatkan umat muslim di Lampung untuk meningkatkan Ukhuwah Islamiah dan tidak terpecah belah.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 16 JANUARI 2018

Struktur tematik analisis framing pemberitaan Lampost.co periode 16 Januari 2018, yakni Pemberitaan ini terdapat 11 paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat penguat tentang puluhan ribu warga dan anggota stekher mania berselawat, paragraf terakhir diperkuat dengan pernyataan Sunarni yang tetap semangat berselawat meski menempuh jarak 20 km.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 16 JANUARI 2018

Pembahasan di penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni kata “Mendoakan yang terbaik untuk Lampung” sebagai bentuk penjabaran judul dan didukung oleh foto Mustafa berselawat bersama Habib Syech.

**Tabel 2. Analisis Framing Pemberitaan Lampost.co Berjudul
Syekher Mania Selawat Bersama Mustafa dan Habib
Syech 16 Januari 2018**

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Syekher Mania Selawat Bersama Mustafa dan Habib Syech
	Lead	Lampost.co – Meski hujan puluhan ribu warga dan anggota syekher mania tetap semangat mengikuti selawat bersama Habib Syech Assegaf di Lapangan Candra Kencana Kabupaten Tulang Bawang Baarat, Senin (15/1) Malam
	Latar Informasi	Kegiatan selawat bersama Habib Syech bertujuan untuk kebaikan umat muslim di Lampung dan Indonesia pada umumnya. Habib Syech mendoakan Mustafa bisa memimpin Lampung dan apresiasi untuk Mustafa yang semangat menghidupkan selawat di tengah masyarakat
	Kutipan Sumber	Sementara itu, Habib di hadapan puluhan para penggemar banyak memanjatkan doa untuk kebaikan umat muslim di Lampung dan Indonesia pada umumnya, Habib Syech juga mendoakan Mustafa bisa memimpin Lampung. Dia mengapresiasi atas langkah Mustafa yang begitu semangat menghidupkan selawat di tengah masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Para pemimpin harus dapat meneladani apa yang dilakukan Mustafa yang menghidupkan selawat di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	Di sela-sela kegiatan juga dilakukan pelantikan pengurus Syekher Mania Kabupaten Tulangbawang

		Barat yang dipimpin langsung Ustaz Ali Maksum. Pelantikan dilakukan ketua Syekh Mustafa dengan mengenakan serban kepada Ketua Syekh Tubaba
Struktur Skrip	What	Mustafa dan Habib Syech Gelar Selawat bersama Syekh Mania Lampung
	Who	Mustafa dan Habib Syech
	When	15/1/2018
	Where	Lapangan Candra Kencana Kabupaten Tulangbawang Barat
	Why	Selawat bersama Habib Syech dilakukan untuk mendoakan Mustfa bisa memimpin Lampung
	How	Mustafa mengingatkan umat muslim di Lampung untuk meningkatkan Ukhuwah Islamiah dan tidak terpecah belah.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat 11 paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat penguat tentang puluhan ribu warga dan anggota stekher mania berselawat, paragraf terakhir diperkuat dengan pernyataan Sunarni jemaah tetap semangat berselawt meski menempuh jarak 20 km
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Mendoakan yang terbaik untuk Lampung” sebagai bentuk penjabaran judul dan didukung oleh foto Mustafa berselawat bersama Habib Syech

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 13 FEBRUARI 2018

Struktur sintaksis terdiri dari judul, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan dan penutup (Eriyanto, 2011:295). Struktur sintaksis pemberitaan, Keren Mustafa Tak Anggap Lawan, Tapi Saudara. *Lead* berita seperti radarlampung.co.id - Kalian bukan lawan saya, tapi kalian saudara saya. Selanjutnya, latar informasi, yakni Simbol angka empat adalah genap. Sementara itu, kutipan sumber dari Mustafa yang mengatakan “Karena kami sudah terbukti, infrastruktur jalan akan saya bangun dalam waktu satu tahun, gangguan kami buat program Kece, Universitas Gratis dan petani

susah Mustaga akan bantu,” Jelasnya, Selasa Malam (13/2). Selain itu, unsur penutup dalam pemberitaan, yakni kata “Membuat Lampung Bahagia” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi sangat mendukung.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 13 FEBRUARI 2018

Struktur skrip What dari berita yang ditayangkan Radar Lampung Online periode 13 Februari 2018, yaitu Mustafa siap Rangkul beragam kalangan. Sementara itu, struktur skrip When dalam berita yang ditayangkan Radar Lampung Online periode 13 Februari 2018, yakni 13/2/2018. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan

how dalam pemberitaan ini, yaitu Merangkul beragam kalangan membuat Lampung bahagia dan angkap genap dentik dengan menggenapi janji bukan obral janji.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 13 FEBRUARI 2018

Metode Framing terdiri dari empat dimensi struktural teks (Sobur, 2001:74). Struktur tematik, yakni Pemberitaan ini terdapat lima paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang membuat lampung bahagia, paragraf terakhir diperkuat dengan

penyataan Mustafa, infrastruktur, pengentasan penganggurandan keamanan sudah terbukti dikerjakan.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 13 FEBRUARI 2018

Pembahasan di penelitian ini terdapat strukur retorik, yakni kata “Membuat Lampung Bahagia” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi Mustafa bersama tiga pasangan cagub dan cawagub Lampung di Gedung KPU.

Tabel 3. Analisis Framing Pemberitaan Radar Lampung Online Berjudul Keren Mustafa Tak Anggap Lawan Tapi Saudara 13 Februari 2018

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Keren Mustafa Tak Anggap Lawan, Tapi Saudara
	Lead	Radarlampung.co.id-Kalian bukan lawan saya, tapi kalian saudara saya. Jadi, saya pastikan kalau saya menang saya akan buat Lampung bahagia termasuk Ridho, Herman HN dan Arinal
	Latar Informasi	Simbol angka empat adalah genap. Genap identik dengan menggenapi janji bukan obral janji
	Kutipan Sumber	“Karena kami sudah terbukti, infrastruktur jalan akan saya bangun dalam waktu satu tahun, pengangguan kami buat program Kece, Universitas Gratis dan petani susah Mustaga akan bantu,” Jelasnya, Selasa Malam (13/2)
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	Bicara keamanan, jangan rakyat bupatinya yang langsung turun dalam menjaga

		keamana di desa-desa
Struktur Skrip	What	Mustafa siap Rangkul beragam kalangan setelah memenagkan Pilkada Gubernur Lampung 2018
	Who	Mustafa
	When	13/2/2018
	Where	
	Why	Merangkul beragam kalangan membuat Lampung bahagia
	How	Angka empat melambangkan genap. Genap identik dengan menggenapi janji bukan obral janji
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat lima paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang membuat lampung bahagia, paragraf terakhir diperkuat dengan pernyataan Mustafa, infrastruktur, pengentasan penganggurandan keaman sudah terbukti dikerjakan
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Membuat Lampung Bahagia” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi Mustafa bersama tiga pasangan cagub dan cawagub Lampung di Gedung KPU

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN

LAMPOST.CO 16 FEBRUARI 2018

Struktur sintakis pemberitaan ini, yakni “Bupati Lampung Tengah Mustafa Tiba di Gedung KPK”. *Lead* berita, Lampost.co – Bupati Lampung Tengah tiba di Gedung KPK. Selanjutnya, latar informasi dalam pemberitaan Lampost.co, yakni OTT KPK di Lampung Tengah. Sementara itu, dalam berita Lampost.co 16 Februari 2018 terdapat kutipan sumber dari Juru bicara KPK, Febri Diansyah “Sekitar pukul 23.20 WIB tim sudah membawa Bupati

Lamteng ke KPK untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan,” kata Febri.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN

LAMPOST.CO 16 FEBRUARI 2018

Berita yang ditayangkan di Lampost.co periode 16 Februari 2018 memiliki struktur skrip Who, yakni Mustafa. Selanjutnya, struktur skrip What dari berita yang ditayangkan Lampost.co periode 16 Februari 2018, Bupati Lampung Tengah Diperiksa KPK Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang Lampost.co periode 16 Februari 2018, yakni

16/2/2018 dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Anggaran 2018 dan pemeriksaan lanjutan masih dilakukan oleh KPK setelah Mustafa tiba di Gedung KPK pukul 23.30 WIB setelah sebelumnya diperiksa di Polda Lampung.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN

LAMPOST.CO 16 FEBRUARI 2018

Metode Framing terdiri dari empat dimensi struktural teks (Sobur,

2001:74). Struktur tematik analisis framing pemberitaan periode 16 Februari 2018, yakni Pemberitaan ini terdapat delapan paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang Bupati Lampung Tengah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN

LAMPOST.CO 16 FEBRUARI 2018

Pembahasan penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni kata “Pemeriksaan Lanjutan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan juru bicara KPK.

**Tabel 4. Analisis Framing Pemberitaan Lampost.Co Berjudul
Bupati Lampung Tengah Mustafa Tiba di Gedung KPK
16 Februari 2018**

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
	Lead	Lampost.co – Bupati Lampung Tengah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mustafa ditangkap karena diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun Anggaran 2018
	Latar Informasi	Operasi Tangkap Tangan KPK di Lampung Tengah dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 1,16 miliar.
	Kutipan Sumber	Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan orang nomor satu di Lampung Tengah itu tiba di markas antikorupsi sekitar pukul 23.30 WIB. Saat ini, Mustafa sedang menjalani pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya sempat diperiksa di Polda Lampung. “Sekitar pukul 23.20 WIB tadi tim sudah membawa

		Bupati Lampung Tengah ke KPK untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2.2018)/
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	
Struktur Skrip	What	Bupati Lampung Tengah Diperiksa KPK
	Who	Mustafa
	When	16/2/2018
	Where	Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
	Why	Diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Anggaran 2018
	How	Pemeriksaan lanjutan masih dilakukan oleh KPK setelah Musata tiba di Gedung KPK pukul 23.30 WIB setelah sebelumnya diperiksa di Polda Lampung
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat delapan paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang Bupati Lampung Tengah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Pemeriksaan Lanjutan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan juru bicara KPK.

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 MARET 2018

Struktur sintaksis pemberitaan ini, yakni Cawagub Jajuli Ingatkan Ketahanan Keluarga. *Lead* beritanya Radarlampung.co.id – Calon wakil gubernur (cawagub) Lampung nomor urut 4, Ahmad Jajuli sambangi kelompok pengrajin kerupuk berbahan baku singkong di Balai Kencono Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (3/3). Selanjutnya, latar informasi ketahanan keluarga harus disertai pemahaman kuatnya pemahaman

agama, faktor ekonomi, komunikasi dan faktor eksternal. Sementara itu, kutipan sumber dari Jajuli “Ibu-ibu di sini sudah membangun salah satu terwujudkan ketahanan keluarga, yakni ketahanan ekonomi keluarga dengan mengembangkan usaha kelompok perempuan,” katanya lagi. Selain itu, unsur penutup Jajuli berkomitmen, kelak dirinya terpilih menjadi pemimpin di Lampung maka dia akan memaksimalkan peran kelompok perempuan untuk menjadi berdaya.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 MARET 2018

Selanjutnya, struktur skrip What, yaitu Cawagub Jajuli ingatkan ketahanan keluarga. Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang ditayangkan Radar Lampung Online periode 4 Maret 2018, yakni 3/3/2018 dan Balai Kencono Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu ketahanan keluarga harus mengikutsertakan usaha kelompok perempuan dan komitmen setelah terpilih menjadi pemimpin yang memaksimalkan peran kelompok perempuan untuk berdaya.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 MARET 2018

Struktur tematik analisis framing pemberitaan periode 4 Maret 2018, yakni pemberitaan ini terdapat tujuh paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang cawagub Jajuli sambangi kelompok pengrajin kerupuk berbahan baku singkong.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 4 MARET 2018

Pembahasan di penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni kata “Mengembangkan usaha ekonomi kelompok perempuan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan Jajuli sedang berbincang dengan pengrajin kerupuk.

Tabel 5. Analisis Framing Pemberitaan Radar Lampung Online Berjudul Cawagub Jajuli Ingatkan Ketahanan Keluarga 4 Maret 2018

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Cawagub Jajuli Ingatkan Ketahanan Keluarga
	Lead	Radarlampung.co.id – Calon wakil gubernur (cawagub) Lampung nomor urut 4, Ahmad Jajuli sambangi kelompok pengrajin kerupuk berbahan baku singkong di Balai Kencono Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (3/3)
	Latar Informasi	Ketahanan keluarga harus disertai pemahaman kuatnya pemahaman agama, faktor ekonomi, komunikasi dan faktor eksternal.
	Kutipan Sumber	Berdasarkan data dari pengadilan Agama

		Provinsi Lampung, penyebab runtuhnya rumah tangga disebabkan oleh empat hal, yakni lemahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, komunikasi, dan faktor eksternal. “Ibu-ibu di sini sudah membangun salah satu terwujudkan ketahanan keluarga, yakni ketahanan ekonomi keluarga dengan mengembangkan usaha kelompok perempuan. Akan sempurna lagi jika kita sering menghadiri taklim atau kajian agama sehingga semakin kokohlah ketahanan keluarga,” katanya lagi.
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	Jajuli berkomitmen, kelak dirinya terpilih menjadi pemimpin di Lampung maka dia akan memaksimalkan peran kelompok perempuan untuk menjadi berdaya
Struktur Skrip	What	Cawagub Jajuli ingatkan ketahanan keluarga
	Who	Ahmad Jajuli
	When	3/3/2018
	Where	Balai Kencono Kabupaten Lampung Timur
	Why	Ketahanan keluarga harus meengikutsertakan usaha kelompok perempuan
	How	Komitmen setelah terpilih menjadi pemimpin yang memaksimalkan peran kelompok perempuan untuk berdaya
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat tujuh paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang cawagub Jajuli sambangi kelompok pengrajin kerupuk berbahan baku singkong
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Mengembangkan usaha ekonomi kelompok perempuan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan Jajuli sedang berbincang dengan pengrajin kerupuk.

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 4 MARET 2018

Struktur sintaksis pemberitaan, yakni “Pendukung Mustafa-Ahmad Jajuli Kampanye dengan Flashmob dan Freezemob”. *Lead* berita lampost.co – Kumpulan ibu-ibu pendukung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 Mustafa-Ahmad Jajuli menggelar kampanye dengan flashmob dan freezemob di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (25/3/2018). Selanjutnya, latar informasi dukungan dari ibu-ibu Hanura, Garnita Nasdem dan Perempuan PKS untuk menyosialisasikan pasangan nomor urut 4. Sementara itu, kutipan sumber dari salah satu peserta “Niat lurus, maju terus. Insha Allah Mustafa-Jajuli menang,” kata Retno, salah satu peserta kampanye.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 4 MARET 2018

Berita yang ditayangkan di Lampost.co periode 4 Maret 2018 memiliki struktur skrip Who, yakni Ibu-ibu Hanura, Garnita Nasdem dan Perempuan PKS. Selanjutnya, struktur skrip What dari berita yang ditayangkan Lampost.co periode, yakni Ibu-ibu pendukung Mustafa-Jajuli Kampanye dengan unik.

Flasmob dan Freezemob. Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang Lampost.co periode 4 Maret 2018, yakni 25/3/2018 dan Tugu Adipura Bandar Lampung. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu menyosialisasikan pasangan nomor urut 4 untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 dan kampanye unik menjadi ciri khas dari pasangan no urut 4.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 4 MARET 2018

Struktur tematik analisis framing pemberitaan periode 4 Maret 2018, yakni Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang ibu-ibu pendukung pasangan cagub dan cawagub melakukan kampanye flashmob dan freezemob.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 4 MARET 2018

Pembahasan di penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni kata “Kampanye unik” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan ibu-ibu pendukung pasangan nomor urut 4 sedang melakukan kampanye

Tabel 6. Analisis Framing Pemberitaan Lampost.co Berjudul Pendukung Mustafa-Ahmad Jajuli Kampanye dengan Flashmob dan Freezemob 4 Maret 2018

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pendukung Mustafa-Ahmad Jajuli Kampanye dengan Flashmob dan Freezemob
	Lead	Lampost.co – Kumpulan ibu-ibu pendukung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 Mustafa-Ahmad Jajulu menggelar kampanye dengan flashmob dan freezemob di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (25/3/2018). Kegiatan itu sejalan dalam rangka menyosialisasikan kandidat berjargon Lampung Maju.
	Latar Informasi	Dukungan dari ibu-ibu Hanura, Garnita Nasdem dan Perempuan PKS untuk menyosialisasikan pasangan nomor urut 4 Mustafa-Ahmad Jajuli
	Kutipan Sumber	Perempuan-perempuan gabungan dari Srikandi Hanura, Garnita Nasdem dan Perempuan PKS tersebut melakukan aksi mematung di beberapa titik sambil membawa atribut bertuliskan angka empat dan memakai topeng Mustafa dan Ahmad Jajuli. “Niat lurus, maju terus. Insha Allah Mustafa-Jajuli menang. Pendukung beliau sangat banyak di seluruh pelosok Lampung,” kata Retno, salah satu peserta kampanye.
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	
Struktur Skrip	What	Ibu-ibu pendukung Mustafa-Jajuli Kampanye dengan Flasmob dan Freezemob
	Who	Ibu-ibu Hanura, Garnita Nasdem dan Perempuan PKS
	When	25/3/2018

	Where	Tugu Adipura Bandar Lampung
	Why	Menyosialisasikan pasangan nomor urut 4 untuk memenagkan Pemilihan Gubernur Lampung 2018
	How	Kampanye unik menjadi ciri khas dari pasangan no urut 4
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang ibu-ibu pendukung pasangan cagub dan cawagub melakukan kampanye flashmob dan freezemob
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Kampanye unik” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan ibu-ibu pendukung pasangan nomor urut 4 sedang melakukan kampanye unik

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 7 APRIL 2018

Struktur sintaksis pemberitaan Ahmad Jajuli Paparkan Visi Misi, Ini Salah Satunya. Dalam pemberitaan ini, *lead* berita dituliskan seperti Radarlampung.co.id – meskipun tanpa calon gubernur (cagub) Mustafa. Pasangan mustafa, Ahmad Jajuli tetap sampaikan visi misinya. Selanjutnya, latar informasi pengentasan kemiskinan dengan Program KE Ce. Sementara itu, kutipan sumber dari Ahamad Jajuli “Kami paslon nomor 4, bila terpilih akan mengentaskan kemiskinan di Lampung. Itu hal yang akan kami lakukan,” jelas pria berkacamata itu.

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 7 APRIL 2018

Struktur skrip Who dalam pemberitaan ini, yakni Ahmad Jajuli. Selanjutnya, struktur skrip What dari berita yang ditayangkan Radar Lampung Online periode 7 April 2018, yaitu Ahmad Jajuli tetap sampaikan visi misi meski tanpa Mustafa. Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang ditayangkan Radar Lampung Online periode 7 April 2018, yakni 7/4/2018 dan Ballroom Hotel Novotel Lampung. Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu visi dan misi Mustafa mengentaskan kemiskinan fokus utama harus dikerjakan dan ketika terpilih program KE Ce menjadi program kerja unggulan untuk mengentaskan kemiskinan.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 7 APRIL 2018

Struktur tematik analisis framing pemberitaan Radar Lampung Online Periode 7 April 2018, yakni Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang tanpa Mustafa, Jajulu sampaikan visi dan misinya.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN RADAR LAMPUNG ONLINE 7 APRIL 2018

Struktur retorik merupakan sebuah cara jurnalis untuk memberi penekanan arti tertentu dalam berita yang ditulisnya. Struktur ini digunakan untuk membangun citra dan meningkatkan gambaran dari sebuah berita (Hussein, 2011:132). Pembahasan di penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni kata “Tanpa Mustafa Tetap Berjalan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan Jajulu sedang memaparkan visi dan misi.

Tabel 7. Analisis Framing Pemberitaan Radar Lampung Online Berjudul Ahmad Jajuli Paparkan Visi Misi, Ini Salah Satunya 7 April 2018

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Ahmad Jajuli Paparkan Visi Misi, Ini Salah Satunya
	Lead	Radarlampung.co.id – meskipun tanpa calon gubernur (cagub) Mustafa. Pasangan mustafa, Ahmad Jajuli tetap sampaikan visi misinya.
	Latar Informasi	Pengentasan kemiskinan dengan Program KECE tetap di paparkan meski tanpa Mustafa.
	Kutipan Sumber	Dalam pemaparan visi dan misinya, Jajuli menyampaikan bila nanti terpilih akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. “Kami paslon nomor 4, bila terpilih akan mengentaskan kemiskinan di Lampung. Itu hal yang akan kami lakukan,” jelas pria berkacamata itu.
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	
Struktur Skrip	What	Ahmad Jajuli tetap sampaikan visi misi meski tanpa Mustafa

	Who	Ahmad Jajuli
	When	7/4/2018
	Where	Ballroom Hotel Novotel Lampung
	Why	Visi dan Misi Mustafa mengentaskan kemiskinan fokus utama harus dikerjakan
	How	Ketika terpilih program KECe menjadi program kerja unggulan untuk mengentaskan kemiskinan
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang tanpa Mustafa, Jajulu sampaikan visi dan misinya.
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Tanpa Mustafa Tetap Berjalan” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi menampilkan Jajul sedang memaparkan visi dan misi.

Sumber : Catatan Peneliti 2018

STRUKTUR SINTAKSIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 7 APRIL 2018

Struktur sintaksis pemberitaan ini, yakni Tim Mustafa- Aja Masih Ada dan Siap Menang. Dalam pemberitaan ini, *lead* berita dituliskan “Lampost.co – Dewan pengarah tim pemenangan Mustafa-Aja, Taufik Basari mengatakan pihaknya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Mustafa-Aja masih ada”. Selanjutnya, latar informasi, yakni Meskipun Mustafa tidak ada secara fisik tetapi tim tetap berusaha mengajak masyarakat untuk mendukungnya. Sementara itu, dalam berita Lampost.co periode Januari 7 April 2018 terdapat kutipan sumber dari Taufik Basari seperti “Pendukung Mustafa-Aja semakin banyak dan semakin menggelora semangatnya,” kata dia usai kampanye kreatif mannequin challenge

di bundaran gajah tugu adipura, Minggu (15/4/2018).

STRUKTUR SKRIP ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 7 APRIL 2018

Berita yang ditayangkan di Lampost.co periode 7 April 2018 memiliki struktur skrip Who, yakni Taufik Basari. Selanjutnya, struktur skrip What dari berita yang ditayangkan Lampost.co periode 7 April 2018, yaitu Tim Mustafa-Aja tetap berkerja mengajak masyarakat untuk mendukung Mustafa. Sementara itu, struktur skrip When dan Where dalam berita yang ditayangkan Lampost.co periode 7 April 2018, yakni 16/4/2018 dan Tugu Adipura Bandar Lampung.

Selain itu, pembahasan mengenai struktur why dan how dalam pemberitaan ini, yaitu meskipun Mustafa tidak hadir tetapi tim

pemengangan selalu hadir di masyarakat dan mannequin challenge menjadi sarana mendukung dan menyosialisasikan Mustafa-Aja kepada masyarakat.

STRUKTUR TEMATIK ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 7 APRIL 2018

Struktur tematik analisis framing pemberitaan Lampost.co periode 7 April 2018, yakni Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang Tim Mustafa-Aja masih ada dan terus

mengajak masyarakat untuk mendukung Mustafa.

STRUKTUR RETORIS ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN LAMPOST.CO 7 APRIL 2018

Pembahasan di penelitian ini terdapat struktur retorik, yakni Kata “Meskipun secara fisik tidak ada” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi Taufik Basri sebagai Dewan Pengarah Tim Pemenangan Mustafa-Aja terus berkerja demi memenangkan Mustafa.

Tabel 8. Analisis Framing Pemberitaan Lampost.co Berjudul Tim Mustafa-Aja Masih Ada dan Siap Menang 7 April 2018

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Tim Mustafa- Aja Masih Ada dan Siap Menang.
	Lead	Lampost.co – Dewan pengarah tim pemenangan Mustafa-Aja, Taufik Basari mengatakan pihaknya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Mustafa-Aja masih ada dan terus semangat. Pihaknya terus berkerja memenangkan dan berkorban untuk Mustafa-Aja.
	Latar Informasi	Meskipun Mustafa tidak ada secara fisik tetapi tim tetap berusaha mengajak masyarakat untuk mendukungnya.
	Kutipan Sumber	“Pendukung Mustafa-Aja semakin banyak dan semakin menggelora semangatnya,” kata dia usai kampanye kreatif <i>mannequin challenge</i> di bundaran gajah tugu adipura, Minggu (15/4/2018)
	Pernyataan/Opini	
	Penutup	
Struktur Skrip	What	Tim Mustafa-Aja tetap berkerja

		mengajak masyarakat untuk mendukung Mustafa
	Who	Taufik Basari
	When	16/4/2018
	Where	Tugu Adipura Bandar Lampung
	Why	Meskipun Mustafa tidak hadir tetapi tim pemengangan selalu hadir di masyarakat
	How	Mannequin challenge menjadi sarana mendukung dan menyosialisasikan Mustafa-Aja kepada masyarakat
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Pemberitaan ini terdapat empat paragraf, paragraf awal dimulai dengan kalimat tentang Tim Mustafa-Aja masih ada dan terus mengajak masyarakat untuk mendukung Mustafa
Struktur Retoris	Kata, idiom, gambar, grafik	Kata “Meskipun secara fisik tidak ada” sebagai bentuk penjabaran judul dan foto sebagai ilustrasi Taufik Basri sebagai Dewan Pengarah Tim Pemenangan Mustafa-Aja terus berkerja demi memenangkan Mustafa

Sumber : Catatan Peneliti 2018

KESIMPULAN

Radar Lampung Online mengkonstruksikan kredibilitas pemberitaan yang menurut peneliti sangat kurang jumlah kata dalam menuliskan pemberitaan Mustafa. Selain itu, setelah Mustafa resmi ditangkap dan ditahan oleh KPK berdampak pada headline pemberitaannya. Hal ini terlihat dari penggunaan headline Mustafa di periode pemberitaan Januari hingga Februari dan penggunaan headline Ahmad Jajuli pada periode pemberitaan Maret hingga April. Pembingkaiian pemberitaan yang dilakukan Lampost.co dalam mengkonstruksikan kredibilitas sosok Mustafa sangat konsisten. Sosok Mustafa diberitakan sebagai tokoh

politik gaya kampanye dan program kerja yang unik. Pemberian ruang dalam menuliskan berita di website pun sangat melebihi ruang. Sementara itu, penggunaan headline Mustafa tetap ditayangkan di pemberitaan Lampost.co periode pemberitaan Januari hingga April. Kedua media dengan gaya penulisan berbeda memiliki perbedaan pandangan dalam memberitakan sosok Mustafa. Media sangat berperan dalam menggambarkan kredibilitas sosok seorang Mustofa di mata masyarakat Lampung. Dari analisis yang peneliti lakukan, Mustofa sangat menjaga hubungan baik dengan media Lampost.co terutama untuk mempertahankan dan

menjaga kredibilitasnya di masyarakat Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eriyanto. (2011). Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: Lkis.
- Hussein, Adnan. (2011). Mix Methodology Dalam Penelitian Komunikasi. Jakarta: Aspikom.
- Nimmo, Dan. (2001). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santana, K Septiawan. (2005). Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. (2001). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

- Adhitama, Airlangga Pradipta. (2016). Analisis Framing Pembentukan Citra Soemarmo Hadi Saputro Menjelang Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 di Media Harian Rakyat Jateng. *Jurnal The Messenger*, Vol. 8. No. 1 Edisi Januari-Juni.
- Astuti, Misni. (2016). Konstruksi Sosial Media Terhadap Kekuatan Personal Branding Tri Rismaharini Dalam Proses

Komunikasi Politik Kontemporer (Analisis Framing Pemberitaan di Media Online Republika.co.id dan Tempo.com). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1. No. 1 Edisi 2016.

- Atmadja, Xena Levina. (2014). Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Online. *Jurnal E-Komunikasi*. Vol. 2. No. 1 Edisi 2014.
- Kharisma, Tiara. (2017). Pembungkahan Pernyataan Gubernur Jawa Barat Pada Pemberhentian Kebaktian Kebangunan Rohani Dalam Media Daring. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5. No. 2 Edisi Desember.
- Rahadi. (2017). Pembungkahan Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 1-7 Oktober 2015). *Jurnal Aristo*. Vol. 5. No. 1 Edisi Januari.

Internet:

- Alexa, Internet. (2018). Top Site in Indonesia Alexa The Web Informal Company. Diakses 27 Mei 2018. (<http://www.alexacom/topsites/countries>).

MAKNA BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL

(Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober)

EMMY MARTIASTIWI

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung

Email: emmymarts@hotmail.com

ABSTRAK

Gaya busana merupakan perwujudan identitas seseorang yang mewakili karakter dan sifat seseorang. Sifat dan karakter dapat menjadikan indikator masyarakat untuk melihat sosok. Sosok wanita muslimah di era millennial identik dengan penggunaan hijab. Memasuki era milenial, perkembangan gaya busana pun mulai mempengaruhi jilbab. Beragam desainer melakukan inovasi perkembangan gaya busana jilbab. Fenomena jilbab yang kontroversial mulai berkembang dan digunakan masyarakat. Jilboobs merupakan gaya busana jilbab yang menunjukkan unsur aurat. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Data dalam penelitian ini berasal dari foto di tiga akun media sosial Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober. Makna denotasi yang ditimbulkan dari foto wanita diatas menggunakan jilbab yang ditarik kebelakang dan menunjukkan tonjolan payudara. Makna konotasi yang dibentuk yang dalam foto di akun twitter @jilboober menggambarkan representasi makna gaya busana yang tidak sesuai konsep syariat dan identik dengan menyimpang. Perumpamaan merupakan analogi, dalam pembahasan ini seorang wanita muslimah diyakini terlihat indah dengan tertutup. Analogi metafora dari jilboob dijelaskan dengan dada batu. Dada batu menggambarkan karakter wanita muslimah yang tidak mengikuti syariat agamanya dengan benar.

Kata Kunci : Jilboobs, Semiotika, Gaya Busana

ABSTRACT

Fashion style is a manifestation of the identity of a person who represents the character and nature of a person. Nature and character can be an indicator of society to see the figure. The figure of Muslim women in the millennial era is synonymous with the use of the hijab. Entering millennial era, the development of fashion style began to affect the veil. Various designers innovate the development of hijab clothes. The controversial phenomenon of hijab is beginning to develop and use the community. Jilboobs is a hijab fashion style that shows the element of aurat. This research uses Roland Barthes semiotics analysis method. The data in this study comes from photos in three social media accounts Facebook Jilboob Lovers Account, Instagram Account @ cikgu.bella.co and Twitter Account @Jilboober. The significance of the denotation caused by the photo of the woman above using the hijab is pulled back and shows

a breast bulge. The meaning connotation is formed which in the photo on twitter account @jilboober depicts the representation of the meaning of fashion style that is not in accordance with the concept of Shari'a and identical with deviant. The parable is an analogy, in this discussion a Muslim woman is believed to look beautiful with a closed. The analogy of jilboob metaphors is explained by the crate of a rock. The stone box depicts the character of a Muslim woman who does not follow her religious shariat correctly.

Keywords: Jilboobs, Semiotics, Fashion Style

PENDAHULUAN

Gaya busana merupakan perwujudan identitas seseorang yang mewakili karakter dan sifat seseorang. Sifat dan karakter dapat menjadikan indikator masyarakat untuk melihat sosok. Sosok wanita muslimah di era millennial identik dengan penggunaan hijab. Didalam Agama Islam penggunaan hijab selain sebagai gaya busana, hijab juga salah satu syariat yang wajib diterapkan untuk menutup aurat. Popularitas jilbab yang kemudian berkembang pesat, tel-ah mengangkat diskusi tentang hal apa yang merupakan tradisi Arab dan hal apa yang merupakan ajaran agama. Dengannya, interpretasi dan praktek dalam penyikapan dan penggunaan jilbab, mengalami beragam variasi (Van Dijk dalam Nugrahenny, 2016:17).

Dinamika perkembangan jilbab di Indonesia dimulai di era orde baru. Selain itu, jilbab juga memiliki banyak makna sebab penggunaannya pada waktu dan kondisi tertentu. Penggunaan di kondisi tertentu dapat diterapkan di lingkungan kampus, pekerjaan dan didalam rumah. Pada masa ini, jilbab merupakan simbol syiar keag-amaan, terkait ketaatan muslimah dalam menutup aurat. Pada masa ini pula, mukena dijadikan sebagai referen-si yang banyak digunakan, untuk

merepresentasikan pakaian penutup aurat muslimah. Pada masa syiar ini, muslimah di Indonesia belum banyak yang memiliki kesadaran untuk menutup aurat dalam kehidupan sehari-harinya, kecuali saat melaksanakan shalat (Nugrahenny, 2016:17).

Memasuki era milenial, perkembangan gaya busana pun mulai mempengaruhi jilbab. Beragam desainer melakukan inovasi perkembangan gaya busana jilbab. Fenomena jilbab yang kontroversial mulai berkembang dan digunakan masyarakat. Jilboobs merupakan gaya busana jilbab yang menunjukkan unsur aurat. Gaya busana jilboob sudah mengubah paradigma sebagai pelindung dan penutup tubuh wanita. Seiring dengan berjalannya waktu, fashion yang sekarang ini dianggap sebagai trend yang berubah secara konstan dan lebih merupakan kesenangan ternyata memiliki makna yang lebih dalam dan pengaruh yang lebih besar di dalam kehidupan seorang manusia. Fashion telah menjadi bagian dari kesadaran diri setiap orang dan bukan lagi hanya mengenai tampilan luar. Style seseorang tergantung oleh siapa yang menggunakan, oleh karenanya fashion menjadi bagian dari refleksi seseorang yang membawa kita kepada kesimpulan bahwa fashion telah

menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk mempresentasikan dirinya sendiri di tengah khalayak luas (Triputra dan Angelina, 2015:166).

Media yang digunakan dalam penelitian, yakni akun media sosial Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober). Pengguna media sosial facebook, instagram dan twitter disebabkan media sosial ini merupakan sarana pengunggah dan penyebaran foto jilboobs. Penyebaran foto di media sosial sifatnya cepat dan tanpa hambatan. Akun-akun jilboob mengalami perkembangan infografik dalam memperoleh like, komentar, dan repost twitt. Jilboobs berawal dari sebuah akun Facebook bernama Jilboobs Community. Akun tersebut mula-mulanya menuliskanIndahnya saling berbagi, diolah dari berbagai sumber sebagai deskripsi akun Jilboobs. Akun yang sudah memiliki tiga ribu lebih likes, dan sudah mengunggah foto sebanyak 26 foto yang diposting pada 29 Januari 2014. Jilboobs, akronim dari Jilbab dan boobs (dada) ini menjadi istilah yang makin ramai diperbincangkan di media sosial pada awal Agustus 2014. Sebagian orang sudah mendengarnya sejak setahun silam, yakni merujuk pada cara berpakaian wanita berkerudung yang masih menggunakan pakaian ketat membentuk tubuh, terutama di bagian atas atau dada (Malang Post. 2014).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan semiotika gaya busana jilbab muslimah diantaranya, Wicaksono (2012:168) yang melakukan penelitian tentang “Representasi

Eksplotasi Perempuan dalam Iklan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini telah membuktikan adanya representasi eksploitasi perempuan di dalam TVC Berrygood versi “Bikin Good Mood”. Permasalahan di sini adalah terjadinya subordinasi perempuan dilakukan secara sengaja sebagai sebuah metode komunikasi yaitu subliminal sexuality. Semestinya metode tersebut tidak perlu digunakan terhadap pesan penjualan komoditi seperti dalam objek penelitian ini. Melihat dari target market produknya adalah remaja, maka subliminal sexuality yang ditanamkan ke dalam pesan penjualan akan menjadi sia-sia. Hasilnya hanyalah mendiskreditkan golongan tertentu (dalam penelitian ini adalah perempuan) yang pada akhirnya akan mendiskreditkan produk yang diiklankan itu sendiri.

Selanjutnya, Hamidah dan Syadzali (2016:117-126) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Fenomena Jilboobs”. Hasil peneleitian menunjukkan bahwa jilboobs fenomena menandakan gaya budaya yang merusak busana muslimah terutama generasi muda. Fungsi jilbab tidak lagi menutupi aurat wanita tetapi menjadi gaya busana yang merusak syariat agama. Fenomena jilboobs menunjukkan konotasi negatif dari fungsi jilbab sebenarnya.

Sementara itu, Ulfa (2016:401-438) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Semiotika Peirce Pakaian Jenis Gamis Sebagai Representasi Budaya Arab”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil analisis

menunjukkan bahwa jubah dalam bahasa Arab berarti: menunjukkan nilai praktis dalam berbisnis, menunjukkan kekuasaan Arab atas bangsa lain, membangun persatuan Arab, menjadi keluarga pelindung, menjalankan kehidupan dengan santai, kesederhanaan, pola, religiusitas, penyesuaian diri, status sosial, dan ibadah. Perbandingan dengan jubah yang dikenakan di Indonesia menemukan bahwa sembilan dari sebelas makna ini telah bergeser sementara dua makna: kesederhanaan dan ibadah, masih tetap sama seperti dalam bahasa Arab, bahkan lebih diperkuat. Adapun makna jubah di Indonesia termasuk kepemimpinan ras, keragaman dalam pakaian, pemahaman Islam rendah, bagian dari kekuatan, yang meliputi pelanggaran, akulturasi, identitas, religiusitas, kesopanan, strategi seksual, status sosial, pencerahan, pertobatan, sehari-hari hidup di pesantren dan toleransi. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran makna dari bentuk ini adalah faktor fisik dan budaya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Data dalam penelitian ini berasal dari foto di tiga akun media sosial Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober. Berdasarkan foto yang diunggah di akun media sosial diatas, peneliti menemukan tiga foto. Dari tiga foto yang diunggah peneliti merumuskan permasalahan penelitian, bagaimana makna busana jilboobs bagi wanita di era milenial. Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan

pertandaan yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang juga bertingkat-tingkat, yaitu tingkat konotasi, denotasi dan metafora. Denotasi adaah tingkat tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang menghasilkan makna pasti. Makna denotasi dalam hal ini, adalah makna pada apa yang tampak. Misalnya, foto midun, berarti wajah midun yang sesungguhnya. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak langsung dan tidak pasti. Misalnya, tanda bunga, ia mengonotasikan kasih sayang. Jadi, denotasi adalah makna paling nyata dari tanda, sedangkan konotasi adalah istilah yang menunjukkan signifikasi tahap kedua (Barthes dalam Muzakki, 2007:12-25).

HASIL DAN PEMBAHASAN

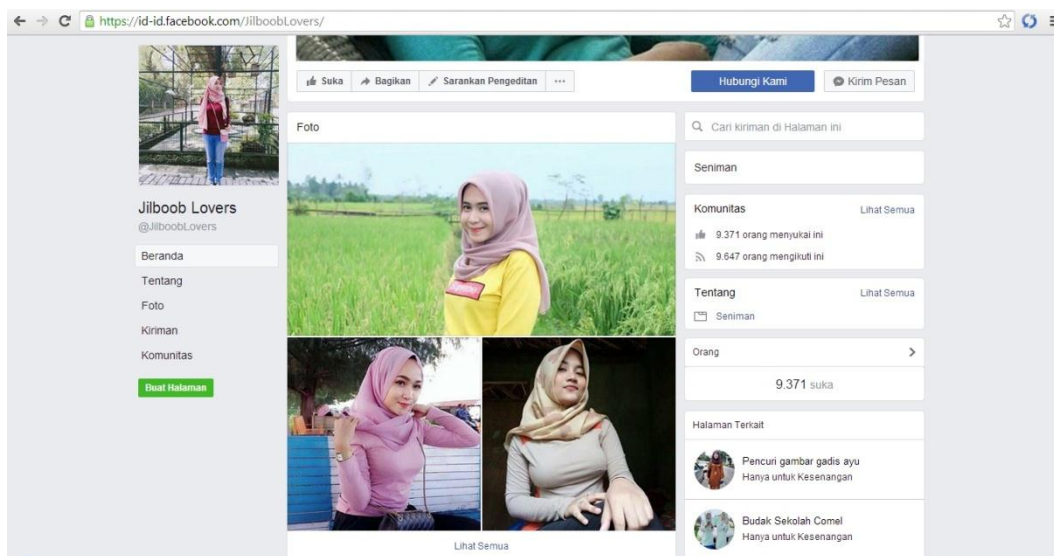
Analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan model analisis semiotika roland barthes. Media yang digunakan adalah facebook, instagram dan twitter. Dari tiga media sosial, peneliti akan menganalisis menggunakan denotasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi menggunakan pemikiran roland barthes. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sistem tanda, yaitu a) denotasi adalah makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek, b) konotasi merupakan makna kultural yang melakat pada sebuah terminolog dan c) metafora merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan

sesuatu dengan analogi (Kriyantono, 2006:272).

Pembahasan mengenai “Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita di Era Milenial” akan peneliti analisis menggunakan model analisis semiotika Roland Barthes. Semiotika roland barthes dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena tren jilboobs di kalangan muslimah. Berdasarkan penjelasan diatas, gaya busana sangat berkaitan dengan sistem tanda. Barthes (1968:38) model tanda penanda menekankan pentingnya konvensi sosial yang mengatur hubungan antara wujud konkrit dengan sebuah tanda yang memiliki konsep abstrak. Sebuah tanda memiliki sebuah makna yang disebabkan adanya kesepakatan sosial diantara pengguna bahasa tentang sebuah makna didalamnya.

MAKNA DENOTASI BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL

Pembahasan mengenai “Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita di Era Milenial” akan peneliti analisis menggunakan model analisis semiotika Roland Barthes. Semiotika roland barthes dapat digunakan sebagai pendekatan melihat fenomena jilboobs. Barthes (2015:100) ada tiga tipe busana dalam pembahasannya seperti image fashion merupakan busana yang ditampilkan dalam dunia fotografi, writen fashion identik dengan busana yang mendeskripsikan secara tertulis atau ditransformasikan ke dalam bahasa dan real clothing yang menjadi busana aktual yang dikenakan tubuh manusia sehingga busana menjadi objek.



Gambar 1. Foto dari Facebook Jilboob Lovers yang menunjukkan gaya busana yang tidak sesuai syariat

Gaya busana jilboobs yang dikenakan wanita muslimah dan diunggah di media sosial facebook menunjukkan

perubahan makna jilbab yang menutup aurat menjadi sarana menunjukkan aurat yang dapat dinikmati beragam

kalangan. Media sosial facebook memiliki keunggulan dapat menjangkau semua kalangan sebab desain antar muka dari media sosial ini mudah dioperasikan dari anak-anak hingga orang tua. Ketika wanita muslimah menggunakan jilbab dan cadar untuk menutupi aurat dari tatapan laki-laki yang bukan mahramnya. Didalam foto yang diunggah di media sosial menggambarkan identitas kaum wanita muslimah yang mengikuti tren busana barat tetapi melupakan sisi etika dan budaya ketimuran. Keseharian gaya busana wanita muslimah di yang tinggal di belahan dunia timur sangat mengedepankan etika kesopanan terutama dalam hal busana. Makna denotasi yang ditimbulkan dari foto wanita diatas menggunakan jilbab yang ditarik kebelakang dan menunjukan tonjolan payudara. Selain itu, mengunggah kemedial sosial sebagai alat untuk membuat dirinya tenar

dengan mendapatkan like dan komentar yang beragam dari masyarakat yang sedang melakukan penjelajahan di media sosial.

MAKNA KONOTASI BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL

Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda, yang didalamnya beroperasi makna yang tidak langsung dan tidak pasti (Barthes dalam Muzakki, 2007:12-25). Makna konotasi merupakan makna yang tidak pasti tetapi selalu berhubungan dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung. Gaya busana wanita jilboobs sangat memperlihatkan kemolekan tubuh seorang wanita terutama wanita muslimah. Gaya busana seperti ini menunjukan karakter dari seorang wanita muslimah yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.



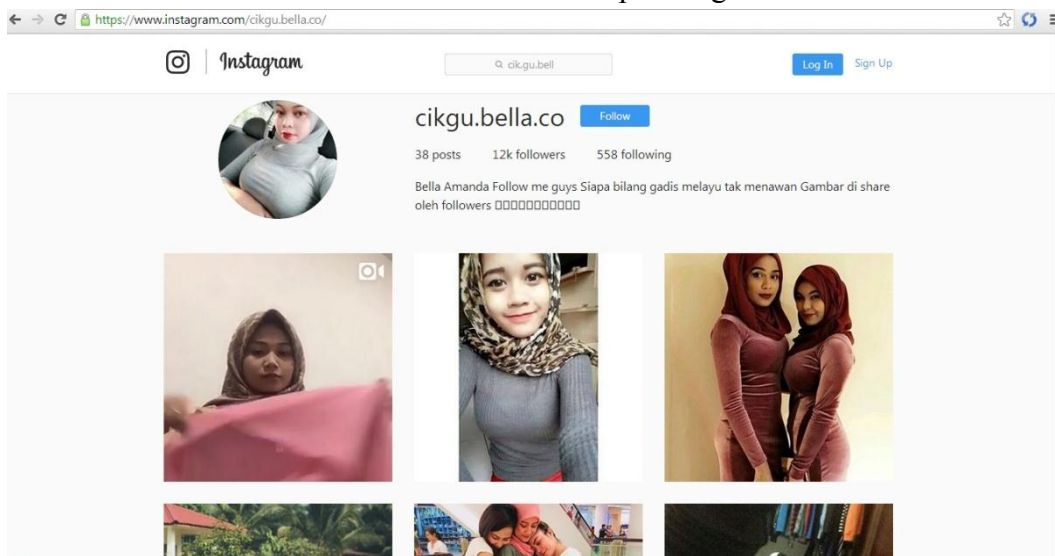
Gambar 2. Foto dari Twitter @Jilboober yang menunjukan kemolekan tubuh dan memakai hastag jilboober

Dari penjelasan diatas, terdapat makna konotasi dari foto yang diunggah di akun twitter @jilboober. Sebuah foto yang sudah terpampang di *timeline*. Penggunaan media twitter sebagai media menyebarluaskan foto jilboobs sangat berakaitan dengan makna kultural. Konsep yang dibentuk jilboober untuk mengunggah ke media twitter lebih menunjukan kesalahan dalam dunia pergaulan dan kurang memahami konsep busana yang digunakan. Konotasi yang dibentuk dalam foto tersebut menunjukan rasa bangga akan fotonya yang diunggah dan mampu menjadi trending topic di twitter. Jadi, makna konotasi yang dibentuk yang dalam foto di akun twitter @jilboober menggambarkan representasi makna gaya busana yang

tidak sesuai konsep syariat dan identik dengan menyimpang.

MAKNA METAFORA BUSANA JILBOOBS BAGI WANITA DI ERA MILENIAL

Selain, kombinasi menggunakan tanda. Semiotika roland barthes juga mengungkap interaksi di antara tanda-tanda. Tanda yang dibahas dalam jurnal ini adalah meatofora. Piliang (2004:193) merupakan sebuah model relasi antar tanda yang didalamnya terdapat sebuah sistem yang bertujuan untuk menjelaskan makna untuk sebuah sistem lainnya. Wanita muslimah selalu identik dengan busana yang menutup aurat dari atas sampai kebawah. Jilbab yang tertutup menjadi modal untuk wanita muslimah untuk melindungi dari pandangan kaum laki-laki.



Gambar 3. Foto dari Instagram @cikgu.bella.co yang menunjukkan koleksi foto wanita muslimah seperti dalam bentuk kolase album

Metafora merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan analogi (Kriyantono, 2006:272). Tanda

metafora ini identik dengan perumpamaan. Perumpamaan dalam pembahasan ini merujuk dari hasil

analisis dan pembahasan sebelumnya. Perumpamaan merupakan analogi, dalam pembahasan ini seorang wanita muslimah diyakini terlihat indah dengan tertutup. Analogi metafora dari jilboob dijelaskan dengan dada batu. Dada batu menggambarkan karakter wanita muslimah yang tidak mengikuti syariat agamanya dengan benar. Selain itu, bagi segelintir wanita yang bangga menunjukkan payudaranya dan juga jilbabnya menunjukkan adanya karakter yang menyimpang. Balutan jilbab yang menonjolkan kemolekan tubuh merepresentasikan penampilan wanita. Penggunaan jilbab pashmina, jilbab segiempat, jilbab langsung dan syar'i dikombinasikan dengan busana yang ketat menimbulkan kesan yang kurang etis dan baik terutama dalam pandangan yang berbeda muhrim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober) dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Pemaknaan denotasi dalam penelitian Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober). Makna denotasi yang ditimbulkan dari foto wanita diatas menggunakan jilbab yang ditarik

kebelakang dan menunjukan tonjolan payudara. Selain itu, mengunggah kedia media sosial sebagai alat untuk membuat dirinya tenar dengan mendapatkan like dan komentar yang beragam dari masyarakat yang sedang melakukan penjelajahan di media sosial. Didalam foto yang diunggah di media sosial menggambarkan identitas kaum wanita muslimah yang mengikuti tren busana barat tetapi melupakan sisi etika dan budaya ketimuran. Keseharian gaya busana wanita muslimah di yang tinggal di belahan dunia timur sangat mengedepankan etika kesopanan terutama dalam hal busana.

- 2) Pemaknaan konotasi dalam penelitian Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober). Makna konotasi yang dibentuk yang dalam foto di akun twitter @jilboober menggambarkan representasi makna gaya busana yang tidak sesuai konsep syariat dan identik dengan menyimpang. Konotasi yang dibentuk dalam foto tersebut menunjukan rasa bangga akan fotonya yang diunggah dan mampu menjadi trending topic di twitter.
- 3) Pemaknaan metafora dalam penelitian Makna Busana Jilboobs Bagi Wanita Di Era Milenial (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Foto di Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram

@cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober). Perumpamaan merupakan analogi, dalam pembahasan ini seorang wanita muslimah diyakini terlihat indah dengan tertutup. Analogi metafora dari jilboob dijelaskan dengan dada batu. Dada batu menggambarkan karakter wanita muslimah yang tidak mengikuti syariat agamanya dengan benar. Selain itu, bagi segelintir wanita yang bangga menunjukkan payudaranya dan juga jilbabnya menunjukkan adanya karakter yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Monica Stella dan Triputra, Pinkey. (2015). Analisis Semiotik Fashion Ines Ariani Sebagai Bentuk Presentasi Diri. Jakarta. 7(2), 165-179.
- Barthes, Roland. (2015). *The Language of Fashion*. New York: Berg.
- Barthes. Roland. (1968). *Elements of Semiology*. New York : Hill and Wang.
- Hamidah dan Syadzali, Ahmad. (2016). Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Fenomena Jilboobs. Banjarmasin. 4(2), 117-126.
- Kriyantono, Rachmat. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Malang Post. Fenomena Jilbobs di Kalangan Wanita. www.malang-post.com (diakses 9 Juni 2018)
- Muzakki, Akhmad. 2007. *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*. Malang: UIN Malang Press.
- Nugrahenny, Tourmalina Tri. (2016). *Menyingkap Mekanisme Tanda di Balik Hiperrealitas Tren Hijab: Analisis Semiotika pada Fenomena Tren Hijab*. Jakarta : Jurnal Komunikasi Indonesia. 5(1), 16-28.
- Piliang, Yasir Amir. (2004). *Semiotika Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks*. Bandung. 5(2), 190-198.
- Ulfa, Ruzqiyah. (2016). Analisis Semiotika Peirce Pakaian Jenis Gamis Sebagai Representasi Budaya Arab. Jakarta. 10(2), 402-438.
- Wicaksono, Ignatius Prasetyo. (2012). *Representasi Eksploitasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta. 9(2), 149-165.

ANALISIS FRAMING PERSEPSI FOLLOWER AKUN FACEBOOK PARTAI PSI (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) DPC KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI LAMPUNG

I NENGAH SETAT

Mahasiswa Pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Email: nengahsetatdas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Konstruksi realitas adanya persepsi follower Akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bandar Lampung di sosial media untuk mempertahankan eksistensi partainya dalam percaturan politik nasional. Dalam mengulasnya peneliti menggunakan studi analisis framing terhadap sisi implementasi kesetaraan gender di Lampung. Pendalaman metodologi penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis kontruksi realitas dan analisis framing terhadap upaya fungsionaris PSI Bandar Lampung dalam mengimpelemtasikan kesetaraan gender melalui media sosial Facebook tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan kesetaraan gender adalah hasil dari perumusan ideologi PSI yang bersumber dari kepercayaan dan keyakinan ideologi politik fungsionaris PSI Bandar Lampung. Bagi mereka, kesetaraan gender menjadi isu yang berpengaruh besar terhadap etos kerja ideologi politik PSI nasional termasuk di Bandar Lampung, karena ikatan ideologi kesetaraan gender dianggap ethos dan mithos perjuangan PSI yang sudah terinterpretasikan sebagai simbol komunikasi politik yang seragam. Terlihat dari ethos kerja dengan bergiat di sosial media sebagai agenda yang rutin di evaluasi dengan melakukan justifikasi terhadap isu-isu tersebut yang diresponship.

Kata kunci: Konstruksi, Framing, Komunikasi Politik, Sosial Media

Abstract

This study aims to provide an overview of the reality construction of the perception of the follower of Solidaritas Indonesia's Party (PSI) Bandar Lampung in social media facebook akunto maintain the existence of his party in the national political arena. In reviewing the researchers using framing analysis studies on the implementation of gender equality in Lampung. The research methodology is qualitative with the analysis of reality construction and framing analysis toward PSI Bandar Lampung functionary effort in implementing gender equality through social media of Facebook. The results showed that the effort to fight for gender equality is the result of the formulation of PSI ideology that comes from the beliefs and beliefs of political ideology PSI Bandar Lampung functionaries. For them, gender equality has become an issue that has an enormous influence on the ethos of the national ideology of PSI ideology,

including in Bandar Lampung, because the ideological ties of gender equality are considered ethos and myths of the PSI struggle which has been interpreted as a symbol of uniform political communication. Seen from the work ethos with an active in social media as a regular agenda in the evaluation by justifying the issues that diresponsip.

Keywords: Construction, Framing, Political Communication, Social Media

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Konstruksi realitas adanya persepsi follower Akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bandar Lampung di sosial media untuk mempertahankan eksistensi partainya dalam percaturan politik nasional. Bentuknya salah satunya mengkonstruksi realitas PSI Bandar Lampung di sosial media dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sebagai gambaran studi penelitian ini mengacu kepada pendapat Berger dan Luckman mengenai Konstruksi realitas. Dimana terdapat tiga istilah dalam menggambarkan konstruksi realitas, yaitu *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*. Ketiga istilah tersebut dipakai untuk menggambarkan hubungan dialektik antara individu dan masyarakat. Yang dimaksud dengan individu dalam penelitian ini adalah fungsionaris operator akunfacebook PSI Bandar Lampung dengan followernya dalam hal ini adalah masyarakat sosial media.

Menurut Berger dan Luckman, Eksternalisasi menunjukan pada kegiatan kreatif manusia; Obyektivasi menunjuk pada proses dimana hasil dari aktivitas kreatif tadi, mengonfrontasi individu sebagai kenyataan obyektif, dan Internalisasi menunjuk pada proses dimana kenyataan eksternal itu menjadi

bagian dari kesadaran subyektif individu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kegiatan kreatif manusia adalah aktivitas PSI Bandar Lampung di *Facebook*, dapat berupa foto yang diberi komentar berdasarkan tulisan yang dibuat, *share* dari *link* sosial media yang lain, *share* dari sesama pengguna akunfacebook PSI Bandar Lampung. Hasil dari aktivitas PSI Bandar Lampung di *Facebook* bisa dilihat dari komentar atau dialog yang terjadi antara pemilik akun dan teman pemilik akun, atau jumlah teman pemilik akun yang memberikan tanda jempol keatas atau kebawah. Termasuk dari sisi pengimplementasian materi atau topic kesetaraan gender dari sisi responshipnya. Tanda jempol keatas, bermakna teman pemilik akun setuju dengan apa yang ditampilkan operator PSI Bandar Lampung dalam halaman *Facebooknya*. Sedangkan tanda jempol kebawah, bermakna teman pemilik akun tidak setuju dengan ditampilkan PSI Bandar Lampung dalam halaman *Facebooknya*. Sedangkan kesadaran subyektif dan obyektif follower akunfacebook PSI Bandar Lampung bisa dilihat dari apa yang ditampilkan di halaman *Facebooknya*.

Selain konstruksi realitas, penelitian ini juga ingin menggambarkan analisis framing PSI Bandar Lampung terkait pemberitaan kesetaraan gender. Tokoh analisis penelitian yang dipakai

adalah Robert N Entman. Menurut Entman, konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian

mana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Adapun perangkat framing yang digunakan adalah:

Tabel.1 Perangkat Framing Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisain masalah)	Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat ? sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Sebagai penyebab dari suatu masalah, siapa atau aktor yang dianggap sebagai penyebab mereka?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu ? jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan pendefinisian masalah studi terhadap pola kepercayaan dan keyakinan follower facebook PSI Bandar Lampung sebagai dampak terhadap framing komunikasi politik PSI melalui sosial media dalam pengelolaan konflik terkait topic kesetaraan gender yang menentukan eksistensi PSI Bandar Lampung dalam mengarungi pertarungan politik.

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu komunikasi dan memberikan inovasi berupa alternatif media farming, yaitu penelitian framing pemberitaan politik di sosial media. Umumnya, analisis framing terkait dengan pemberitaan politik di media massa,

namun peneliti menawarkan alternatif framing pemberitaan politik di sosial media. Signifikansi dari penelitian ini adalah sebuah gerakan masif pemanfaatan sosial media yang oleh partai politik. Gerakan ini merupakan fenomena baru ditengah-tengah tren perubahan arus informasi dan komunikasi dimana tren kecenderungan adalah menggunakan teknologi 2.0 yaitu media baru (sosial media).

Penelitian Framing sebelumnya menggunakan pendekatan kontruksionis yang mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat, seperti yang tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Framing Media, Wartawan dan Berita

Penilaian	Paradigma Konstruksionis
Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi.	Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu.
Media adalah agen konstruksi.	Media sebagai agen konstruksi pesan.
Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas.	Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas.
Berita bersifat subyektif/konstruksi atas realitas.	Berita bersifat subyektif, opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subyektif.
Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas.	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial.
Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita.	Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
Etika, dan pilihan moral peneliti, menjadi bagian yang integral dalam penelitian.	Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian.
Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita.	Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.

Berdasarkan tabel diatas, media, berita dan wartawan menjadi fokus dalam pendekatan konstruksionis pada analisis framing. Dalam penelitian ini, media dikembangkan menjadi sosial media. Berita dalam penelitian ini juga dikembangkan menjadi teks, gambar atau video yang terdapat di fitur *wall facebook* PSI Bandar Lampung. Sedangkan wartawan atau peliput

dikembangkan menjadi netizen (warga dunia maya), dalam penelitian ini dikerucutkan menjadi follower PSI Bandar Lampung yang bergiat di dunia maya.

Untuk penilaian analisis framing, tetap memakai acuan paradigma konstruksionis, seperti yang tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Aspek Framing dan Paradigma Kontruksionis

Penilaian	Paradigma Konstruksionis
<i>Tujuan penelitian: rekonstruksi realitas sosial</i>	Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti.
<i>Peneliti sebagai fasilitator keragaman subyektifitas sosial.</i>	Peneliti sebagai <i>passionate participant</i> , fasilitator yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial.
<i>Makna suatu teks adalah hasil negosiasi antara teks dan peneliti.</i>	Negosiasi; makna adalah hasil dari proses saling mempengaruhi antara teks dan pembaca. Makna bukan ditransmisikan, tetapi dinegosiasikan.
<i>Penafsiran bagian yang tak terpisahkan dalam analisis.</i>	Subyektif; penafsiran bagian tak terpisahkan dari penelitian teks. Bahkan dasar dari analisis teks.
<i>Menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti— teks.</i>	Reflektif/dialektik; menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti—teks untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif.
<i>Kualitas penelitian diukur dari otentisitas dan reflektivitas temuan.</i>	Kriteria kualitas penelitian; otentisitas dan reflektivitas, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Berdasarkan dua paparan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan Studi terhadap implementasi PSI Bandar Lampung di media facebook sebagai bentuk Komunikasi Politik partai tersebut dalam menghadapi topic masalah kesetaraan gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Konstruksi Framing komunikasi politik PSI Bandar Lampung di sosial media menggunakan teori konstruksi realitas dan analisis framing. Konstruksi realitas merupakan hasil dari pemikiran Berger dan Luckmann di dalam buku mereka yang berjudul “*the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial

yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respon-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitif nya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Dalam penjelasan Deddy N Hidayat, bahwa ontologi paradigma konstruktivis memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang

berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Berikut ini beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunai sosial di sekelilingnya
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus
- d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Selain memberikan asumsi dasar, Berger dan Luckman juga mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat

generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Dilihat dari proses konstruksinya, menurut Berger & Luckman, konstruksi realitas berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis, terdiri dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

- a. *Objective reality*, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
- b. *Symbolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai "*objective reality*" misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.
- c. *Subjective reality*, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam

sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objectivikasi, memunculkan sebuah konstruksi *objective reality* yang baru.

Mengacu pada Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger dan Luckman, kemudian membuat konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi.

1. *Eksternalisasi* ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*".
2. *Objektivasi* ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*".
3. *Internalisasi* ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".

Berdasarkan dialektika diatas, Berger dan Luckman mengasumsikan bahwa konstruksi sosial mengandung dimensi objektif dan subyektif. Ada dua hal yang menonjol dalam melihat realitas dalam dimensi objektif, yakni pelebagaan dan legitimasi.

- a. *Pelebagaan* dalam perspektif Berger terjadi mulanya ketika semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Artinya tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola

yang kemudian bisa direproduksi, dan dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudkan itu. Pelebagaan terjadi apabila suatu tipikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dengan kata lain, tiap tipikasi seperti itu merupakan suatu lembaga.

- b. Sementara *legitimasi* menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal secara subyektif. Hal ini mengacu kepada dua tingkat, pertama keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti secara bersamaan oleh para pesertanya dalam proses-proses kelembagaan yang berbeda. Kedua keseluruhan individu (termasuk di dalam media), yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan harus diberi makna subyektif. Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap pelebagaan yang pertama, dimana lembaga itu sekedar fakta yang tidak memerlukan dukungan lebih lanjut. Tapi menjadi tak terelakan apabila berbagai obyektivasi tatanan kelembagaan akan dialihkan kepada generasi baru. Di sini legitimasi tidak hanya sekedar soal

“nilai-nilai” ia juga selalu mengimplikasikan “pengetahuan” Berdasarkan penjelasan teori diatas, khususnya mengenai pelembagaan dan legitimasi, yang merupakan dimensi obyektif dari realitas, maka bentuk implementasi kesetaraan gender sebagai topic yang diperbincangkan PSI Bandar Lampung dalam akunfacebook-nya, dirancang untuk bisa diterima menjadi realitas sosial di masyarakat, kemudian membuat sejumlah kontruksi pelembagaan dan legitimasi mengenai eksistensinya dengan berbagai media yang ada. Salah satunya dengan menggunakan media FB sebagai sarana untuk melakukan internalisasi yang merupakan dimensi subyektif follower PSI Bandar Lampung, terdeteksi melalui analisis Berger dan Luckmann yang menyatakan, bahwa individu dilahirkan dengan suatu predisposisi ke arah sosialitas dan akhirnya dapat menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah internalisasi, yaitu suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa obyektif sebagai suatu pengungkapan makna. Kesadaran diri individu selama internalisasi menandai berlangsungnya proses sosialisasi.

Aktifitas follower PSI Bandar Lampung secara proaktif melalui akunfacebook PSI Bandar Lampung yang merupakan kumpulan individu yang berkelompok dan menyadari untuk bisa dapat diterima dan harus membuat dirinya eksis dan terlembagakan. Untuk level substansinya, sebagai partai politik, PSI Bandar Lampung sudah mendapatkan dirinya sudah terlembagakan dan sebuah bentuk partai politik. Tapi untuk

memegang kekuasaan di antara partai politik lainnya ia perlu berjuang dan terus menerus mensosialisasikan dirinya. Terlebih lagi, dengan adanya adanya topic kesetaraan gender sebagai isu masalah yang diangkat disetiap percaturan politik praktis, PSI Bandar Lampung melalui akunFB-nya terus berjuang membebaskan diri dari stigma buruk bahwa partai tidak berpihak dari salah satu gender, dalam hal ini perempuan. Berdasarkan pengamatan peneliti di sosial media FB PSI Bandar Lampung, maka konstruksi realitas follower PSI Bandar Lampung dalam menyikapi isu kesetaraan gender melalui sosial media FB, bila ditarik garis merah memiliki ide seragam, yaitu:

1. Isu kesetaraan gender merupakan sebuah konspirasi dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan PSI Bandar Lampung. Pihak-pihak ini diduga datang dari pihak oposisi dan kurang mendukung keberadaan PSI sebagai partai baru peserta Pemilu 2018-2019 ditingkat local, regional, hingga nasional.
2. Isu kesetaraan gender sudah lama menjadi bentuk idealism dan target operasi perjuangan ideologi politik PSI disetiap level atau jenjang kepengurusan, termasuk PSI ditingkat Dewan Perwakilan Wilayah (DPC) Kota Bandar Lampung dengan skenario terbaik, salah satunya melalui strategi eksploitasi hal tersebut di akunfacebook PSI Bandar Lampung.
3. Upaya PSI termasuk di DPC Bandar Lampung yang terus memperjuangkan isu kesetaraan gender sebagai bentuk

pencitraan menarik dukungan salah satu gender (perempuan) seolah dibenturkan melalui opini diluaran partai, sehingga PSI dibenci oleh masyarakat oposisi dikelas menengah keatas yang tidak menghendaki ekstensi partai-artai baru, salah satunya PSI, dengan pengiringan opini bahwa isu kesetaraan gender yang diperjuangkan PSI termasuk DPC Bandar Lampung hanya bentuk polesan ideology semata.

4. Kejanggalaan isu kesetaraan gender yang kurang terekspos dan terimplementasikan dalam ideology partai politik manapun membuat PSI termasuk PSI Bandar Lampung mengangkat, memperjuangkan dan memperkuat isu tersebut dengan tema pembahasan yang berubah-berubah dan menyentuh esensi isu, dengan membuat harapan kepada penarik perhatian kalangan gender perempuan terhadap ideologi karakter politik PSI Bandar Lampung.

Bercermin dari hal tersebut pemanfaatan sosial media seperti Facebook oleh PSI Bandar Lampung tidak saja berisi sanggahan atau pembelaan terkait isu kesetaraan gender sebagai masalah sensitive sebagai bentuk kasus percaturan politik yang belum terselesaikan. Namun juga untuk memberikan informasi kegiatan dan kampanye PSI Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan, terkait strategi *cyber army* yang terdiri dari para operator FB PSI Bandar Lampung yang mengimplementasikan isu kesetaraan gender sebagai program unggulan PSI

Bandar Lampung dalam mendulang dukungan politik, khususnya perolehan suara di pemilu 2018-2019. Seperti tertuang dalam sebuah wawancara terhadap pendiri dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, yang berkomitmen bahwa partainya memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya perempuan. Apalagi hal ini berhubungan banyak dengan generasi perempuan muda, professional dan millennials Indonesia yang belum tertampung dalam kegiatan parpol karena rentan didiskriminasikan lawan jenisnya. Untuk itulah Grace membentuk PSI pasca Pemilu 2014. Secara teknisnya, kesetaraan gender yang diterapkan PSI sebagai garis besar haluan partai politiknya, gender perempuan terbuka luas masuk sebagai fungsionaris, dan pengurus parpol tak boleh berusia lebih dari 45 tahun saat menjabat. “Kurang dari 1 hari boleh, saat menjabat,” ujar Grace, ketika saya wawancarai, Selasa, 15 Agustus 2017 di sebuah restoran di Jakarta. Landasan inilah yang menjadi salah saunya bentuk implementasi kesetaraan gender sebagai bentuk ideologi perjuangan politik melalui media parpol yang tersedia, salah satunya FB. “Lawanlah tulisan dengan tulisan. Lawan tulisan yang negatif tentang PSI dengan tulisan yang positif”, imbuh Grace.

Pada akhirnya, pembaca dan follower FB PSI, khususnya PSI Bandar Lampung akan mendapatkan informasi yang benar dari tulisan, termasuk isu kesetaraan gender yang keluar dari fungsionaris kader PSI Bandar Lampung yang mampu memberikan contoh dan keteladanan.

Isu kesetaraan gender yang menyudutkan partai politik dijadikan pelajaran yang berharga bagi PSI, termasuk di DPC Bandar Lampung untuk mengembangkan roda politik partai tersebut menghadapi persaingan politik, termasuk dimomen pemilu 2018-2019. Dengan kekuatan media sosial, PSI Bandar Lampung dinilai akan semakin besar bila banyak orang yang menulis tentang keunikan dan kehebatan PSI secara umum.

Analisis *framing* merupakan suatu ranah studi komunikasi yang menonjolkan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan. Konsep *framing* atau *frame* sendiri bukan berasal dari ilmu komunikasi, melainkan dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam prakteknya, analisis *framing* juga memungkinkan disertakannya konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomena-fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat benar-benar dipahami dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, politis atau kultural yang melingkupinya.

Konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Robert M. Entman lebih lanjut mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks

komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.

Dari definisi Entman tersebut *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Berdasarkan definisi Entman tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh operator dan follower PSI Bandar Lampung melalui akunFB ketika menyeleksi, menjawab dan menjabarkan isu dan menulisnya di wall FB. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana wall FB tersebut.

Operator dan follower PSI Bandar Lampung juga berusaha untuk saling menonjolkan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing dalam rangka memaknai objek wacana. Keterlibatan mereka dalam suatu diskusi sangat dipengaruhi oleh status, wawasan, dan pengalaman sosial masing-masing. Dalam konteks inilah wacana PSI Bandar Lampung di wall FB kemudian menjadi arena adu dukungan kritis secara simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu objek wacana. Perdebatan terhadap isu wacana yang ditampilkan, salah satunya kesetaraan gender terjadi di dalamnya dilakukan dengan cara-cara

yang simbolik, sehingga lazim ditemukan bermacam-macam perangkat linguistik atau perangkat wacana yang umumnya menyiratkan tendensi untuk melegitimasi diri sendiri dan mendelegitimasi pihak lawan (oposisi). Frame operator dan follower PSI Bandar Lampung di Sosial Media FB, sesuai dengan arahan dari pernyataan sejumlah elit Partai tersebut dari tingkat local, regional, hingga nasional yang dikutip disejumlah Media. Salah satunya seperti frame pendiri dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, dalam menanggapi pertanyaan wartawan menyikapi isu kesetaraan gender dalam ideology dan implementasi perjuangan partai politik diberbagai kesempatan.

Grace menyatakan “kesetaraan gender yang diterapkan PSI sebagai garis besar haluan partai politiknya, gender perempuan terbuka luas masuk sebagai fungsionaris, dan pengurus parpol tak boleh berusia lebih dari 45 tahun saat menjabat. ujar Grace, ketika saya wawancara, Selasa, 15 Agustus 2017 di sebuah restoran di Jakarta. Tak hanya itu, Grace menambahkan peran kader perempuan dipartainya sama pentingnya dengan kader pria yang disampaikan oleh media FB PSI Bandar Lampung, yang mengutip komentar Grace “kami juga salut dengan bro dan sis, hingga di detik-detik akhir proses verifikasi tetap aktif bekerja dan terus memantau perkembangan partai”.

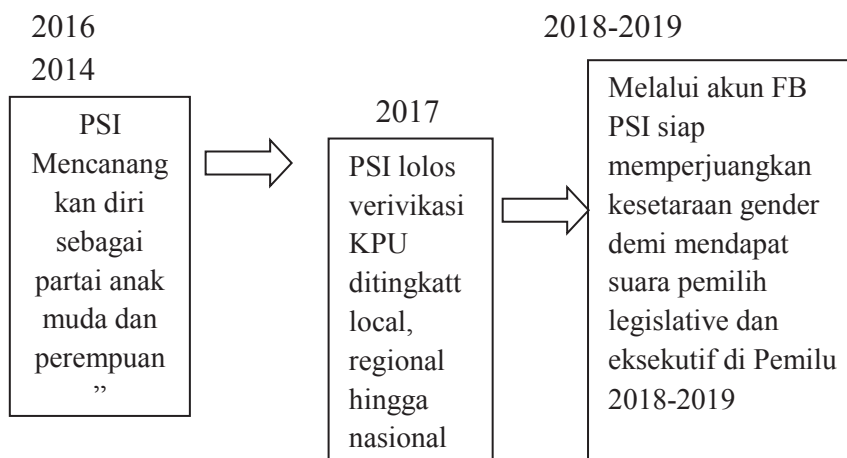
Selain itu, Grace juga menegaskan garis besar partainya dengan tetap menjaga identitasnya sebagai Partai Baru yang peduli terhadap keberadaan Perempuan, dipraktek politik praktis. Selain itu PSI

juga pernah mengkritik sikap Bawaslu bersikap diskriminatif terhadap gender perempuan. Tak hanya itu, sebagai upaya dalam memperjuangkan eksistensinya sebagai partai yang memperjuangkan kesetaraan gender sebagai garis politik partai, Grace juga harus menghadapi bully-an dari pihak oposisi yang menuding keberadaannya dalam percaturan politik hanya bentuk upaya mendongkrak popularitas partai perempuan yang kurang mendapat respon luas public. Salah satunya, terlihat dari upaya kader PSI Tsamara Amany yang melaporkan akun FB Hulk karena melecehkan perempuan dengan menuduh Ketum PSI Grace Natalie selingkuh dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Ditingkat local PSI Bandar Lampung bentuk keberpihakan pada kesetaraan gender terlihat dari foto, text dan literature didalam akun FB-nya yang memuat berbagai kegiatan dipihak internal maupun aktualisasi aktifitas fungsionaris dan kader partai secara eksternal ditengah-tengah masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan Grace Natalia bersama kader dan fungsionaris PSI melalui media social, salah satunya FB tersebut sebagai bentuk implementasi kebutuhan media baru diluar media *mainstream* terhadap kepentingan politik, yang didalamnya keberpihakan pada kesetaraan gender. Salah satu penyebabnya, karena beberapa pemilik media berpolitik. Selain itu, diregulasikan FB PSI ditingkat pusat hingga DPC Kota Bandar Lampung ini fungsionaris dan kader partai tersebut merasa

pemberitaan media arus utama tidak melakukan *cover both side*, dari sisi framing media, yang lebih mengarah kepada ketidakberpihakan partai politik terhadap kesetaraan gender. Selain itu, media juga dinilai membuat dan menyebarkan frame PSI selalu dibenturkan dengan berbagai pihak dengan cara memelintir berita atau isu yang beredar ditengah masyarakat sehingga dipersepsikan negatif.

Keberadaan operator dan follower PSI Bandar Lampung yang ikut menyebarkan *frame* dari sejumlah elit PSI yang memihak pada kesetaraan gender menunjukan eksistensi kader PSI secara global masih solid dalam membela implementasi kesetaraan gender. Oleh karena itu, peran akun FB

masih dipercaya dapat menyuarakan garis besar perjuangan partainya, dengan muara mendapat suara persen pemilih di Pemilu 2018-2019. Apalagi secara nasional, PSI mematak meraih enam besar suara pada Pemilu nasional, sedangkan untuk Pemilu Legislatif 2018, PSI menargetkan puluhan kursi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/kotamadya secara nasional, yang 30-40 persennya diperuntukan bagi kader perempuannya. Untuk itu operator akun FB PSI Bandar Lampung tetap terus berperang sebagai *cyber activist* hingga tercapai cita-cita yang diinginkan. Berikut ini kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 1. Arah perubahan citra sekaligus tantangan eksistensi dalam memperjuangkan isu implementasi kesetaraan gender dalam percaturan politik nasional termasuk menhadapi pemilu 2018-2019.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Blumer, Becker, dan Dezin (dalam Mulyana, 2004:151) bahwa pendekatan

saintifik tidak sesuai untuk menelaah perilaku manusia. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, dan bukan

mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat, dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental analisis kualitatif.

Dengan pendekatan kualitatif, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pembahasan secara mendalam mengenai konstruksi realitas implementasi kesetaraan gender di fitur *akun Facebook* terkait Studi terhadap Pola Kepercayaan dan Keyakinan PSI Bandar Lampung sebagai Dampak Terhadap Framing Komunikasi keberpihakan Politik PSI terhadap perempuan melalui Sosial Media dalam pengelolaan arah kebijakan politik partai. Diharapkan kegiatan tersebut, memberikan hasil positif kepada citra PSI, atau malah sebaliknya, atau bahkan kegiatan operator dan follower PSI Bandar Lampung tersebut menemui benturan dengan ideologi perpolitikan masyarakat pada umumnya.

Metode dalam penelitian ini adalah Metode Analisis framing dan Konstruksi Realitas Berger dan Luckman. Metode analisis Framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Menurut Eriyanto (2002:37), paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tapi hasil dari sebuah konstruksi. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentuk

tertentu. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam fakta agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih ingat, untuk mengiringi interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Robert M. Entman lebih lanjut mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.

Subjek penelitian adalah pesan yang disampaikan operator dan follower diakun FB PSI Bandar Lampung yang aktif di sosial media. Subjek penelitian dipilih berdasarkan purposif sampling, informan ini juga telah merasakan fenomena dari permasalahan peneliti, serta bersedia untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengamalan mereka secara sadar.

Informan dipilih secara purposif menurut Bogdan dan Taylor (1993:163), yaitu:

1. Haruslah dipertimbangkan pendapat dan gagasan subjek penelitian yang sesuai dengan tema besar peneliti ini, yang

dapat dianalisis secara lebih baik dibanding dengan yang lainnya.

2. Terpilihkan tema-tema yang khusus berkenaan implementasi kesetaraan gender berdasarkan kemampuan dan kemauan operator dan follower FB PSI Bandar Lampung untuk menyimak dan mengutarakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa sekarang.
3. Siapa saja yang dianggap menarik, misalnya memiliki pengalaman khusus.
4. Akan lebih bijak jika dihindari penseleksian subjek yang memiliki hubungan profesional dan hubungan khusus lainnya, yang telah mempunyai asumsi-asumsi atau praduga khusus, yakni implementasi kesetaraan gender yang bisa mewarnai penafsiran mereka terhadap apa yang diungkapkan.

Informan dalam penelitian ini dipilih peneliti dengan kriteria: 1) Operator dan follower PSI Bandar Lampung yang aktif di akun sosial media FB partai tersebut. 2) Operator dan follower akun PSI Bandar Lampung yang selalu mengupdate FB tentang topic-topik yang ditampilkan selama dalam rentang waktu tertentu. 3) Akun FB PSI Bandar Lampung memiliki banyak teman, komentar dan tanda suka. Berdasarkan kriteria tersebut, saya mendapatkan enam orang informan yang facebook nya menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif (*participant observation*), dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tampilan facebook, PSI Bandar Lampung memiliki sisi

komunikasi politik dengan memasang, mendampingi dan merespin postingan isu-isu atau berita-berita yang berkenaan dengan eksistensi partai. Dari postingan di halaman facebook tersebut, terlihat bahwa operator dan follower FB saling merespon tiap postingan satu sama lainnya, khususnya postingan yang berkenaan dengan implementasi kesetaraan gender.

Tidak hanya memposting tentang topic-topik atau isu yang berkenaan dengan kesetaraan gender, akun FB PSI Bandar Lampung juga memuat berbagai kegiatan diinternal dan eksternal partai yang dapat dikaitkan dengan topic yang bermuatan dengan isu kesetaraan gender, seperti dalam postingan kebersamaan kader perempuan dan pria menindaklanjuti hasil verifikasi KPUD ditingkat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tampilan facebook tersebut, salah satu operator FB mengucapkan syukur PSI lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2018-2019. Tak hanya dukungan dan berdoa juga datang dari postingan Ketua Umum dan Pendiri PSI Grace Natali yang diunggah di akun PSI Bandar Lampung yang berharap keberadaan PSI dapat menjadi partai alternative baru bagi kawula muda dan perempuan yang kurang diterakomodir oleh partai politik lainnya.

Dalam FB PSI Bandar Lampung juga memuat isu atau topik yang bagian dari isu politik dengan bahasa yang santun, yang ditampilkan dari eksistensi operator dan follower PSI Bandar Lampung. Konsep yang ditampilkan dalam bentuk text, foto, gambar peristiwa, tanggapan, hingga video

dalam akun FB PSI Bandar Lampung itu sebetulnya merupakan bagian dari premis-premis yang dipakai operator PSI Bandar Lampung dalam menyikapi berbagai isu atau topic politik yang beredar dimasyarakat. Bisa hal itu bersifat fenomena, atau bahkan bentuk ketidakadilan salah satunya dari implementasi isu kesetaraan gender. Meski begitu, cara itu bukan berarti menjadikan PSI Bandar Lampung kemudian menjadi pasif hanya berkomentar di akun FB, tapi tetap harus aktif bekerja.

Konsep implementasi yang tertuang dalam FB PSI Bandar Lampung tidak hanya berbentuk konsep informasi, berkomunikasi, berdakwah, bahkan memperingatkan terhadap segala sesuatu hal yang ada disekitar public. Konsep ini merupakan bagian dari konsep ideology dan garis besar pergerakan politik partai, yang menjadi satu kesatuan. Baik dalam bentuk gagasan fundamental dan langkah kerja secara sistematis yang menyeluruh tentang kehidupan perjuangan. Sehingga cara seperti ini diharapkan menjadikan PSI Bandar Lampung dapat dijunjung tinggi karena memiliki *ethos* dan *mythos* kerja yang nyata.

Ethos sebagai faktor pembeda terhadap kelompok atau komunitas lain serta sebagai identitas dan jati diri komunitas. Sedangkan *mythos* adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi, baik oleh pribadi maupun kelompok. Pada awalnya, keaktifan Operator dan follower PSI Bandar Lampung di sosial media FB, mengalami titik kritisnya saat kasus implementasi kesetaraan gender mencuat. Mereka aktif sebagai

pembela gender perempuan yang di bully dan terdiskrimsi dalam dunia politik praktis, termasuk dari berbagai aktualisasi isu sosial media atas kasus yang menyimpannya.

Momen ini menjadi momen bagi operator dan follower PSI Bandar Lampung sebagai brother dan sister net citizen yang aktif di sosial media FB. Sayangnya sebagai pembela implemementasi kesetaraan gender, kehadiran PSI Bandar Lampung kurang direspon, bahkan lebih banyak bernada negatif dari publik, karena terstigma oleh tuduhan opisisi yang rasis terhadap perjuangan partai tersebut. Hal itu menjadikan PSI sebagai korban *bullying* dengan kapasitas sebagai pelaku dan praktisi media social. Walaupun demikian, bagi operator dan follower PSI Bandar Lampung, berbagai bentuk bullying termasuk isu kesetaraan gender yang menimpa fungsionaris dan kadernya tidak berpengaruh besar terhadap kesetiaan pada PSI, karena ada ikatan ideology dan garis besar perjuangan partai sebagai ethos dan mythos yang jelas serta sudah terinterpretasi menjadi simbol komunikasi politik yang seragam.

Akibatnya, ditingkat local Bandar Lampung, langkah yang dilakukan akun FB PSI Bandar Lampung ini mendapatkan pujian dan decak kagum dari masyarakat atas kekompakan dan keteraturannya dalam memenuhi seruan kampanye PSI, yang didalamnya memuat isu kesetaraan gender kepada public. Hal ini membuktikan bahwa Ethos PSI Bandar Lampung dengan bergiat di sosial

media dengan giat, tidak sia-sia. Ethos tersebut berbuah kerapian yang bahkan menjadi agenda pekanan yang rutin di evaluasi pekanan operator PSI Bandar Lampung.

Framing Akun FB PSI Bandar Lampung di sosial media sebagai bentuk upaya mengatasi isu kesetaraan gender.

Adapun keseragaman ide atas kesetaraan gender yang diimplementasikan PSI Bandar Lampung dalam akun FB-nya, terkonstruksi pada pola berikut :

1. Isu kesetaraan gender dihembuskan sebagai sebuah konspirasi dari pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaan PSI. Pihak-pihak ini diduga datang dari opisi yang tidak suka PSI sebagai partai alternative yang potensial menjadi kekuatan baru politik nasional, khususnya diajang pemilu 2018-2019.
2. Isu Kesetaraan gender sudah lama menjadi target operasi dengan skenario ideology dan perjuangan garis besar PSI, untuk menjawab kritisasi parpoly lain yang kurang mengakomodir keberadaan gender perempuan dalam politik praktis. Sehingga ada berbagai pihak yang tidak menyukai kehadiran PSI di panggung politik Indonesia.
3. PSI seolah dibenturkan, sehingga PSI dibenci oleh masyarakat. Namun masih banyak penilaian dari upaya sejumlah lembaga yang menilai PSI sebagai lembaga politik yang masih bisa diharapkan memberi keadilan kesetaraan gender bagi rakyat. Namun ada penggiringan opini, isu kesetaraan

gender itu hanya terbatas pada hanya mengakomodir fungsionaris dan kader perempuan tidak boleh diatas 45 tahun. Hal ini tidak menyukai public, karena isu kesetaraan gender PSI setengah hati dan terkesan tebang pilih.

4. Framing Media mainstream terhadap isu kesetaraan gender yang dilakukan PSI tidak menyentuh proses akar isu, tapi lebih kepada kejadian tampak luar sesai karakter ideology dan garis besar perjuangan partai PSI.

Frame seragam PKS *Lovers* di Sosial Media tersebut, sesuai dengan arahan dari pernyataan sejumlah elit PSI, baik yang dikutip disejumlah Media mainstream, maupun arahan dari kaderisasi PSI ditingkat DPP (pusat), DPW (propinsi) dan DPC (kabupaten/kota) yang disampaikan setiap pekanan kepada kadernya.

Keseragaman ide framing diatas, bila merujuk pada konsep framing Entman, framing akun FB PSI Bandar Lampung dibagi ke dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Kesemua penjelasan diatas adalah seleksi isu dan sekaligus aspek yang ingin ditekankan dalam menggambarkan Pendefinisian impelementasi kesetaraan gender sebagai sumber masalah penelitian ini, yang dinilai dari luar dan dalam PSI. Konstruksi moral yang disosialisasikan akun FB PSI Bandar Lampung ini adalah tetap selalu berbuat 'Baik', walaupun banyak yang tidak suka, walaupun menjadi musuh bersama,

namun buah kebaikan akan selalu menjadi kebaikan.

Dari penjelasan diatas, ada upaya akun PSI Bandar Lampung untuk terus mempromosikan informasi kesetaraan gender, dan mempromosikan kegiatan

dari para kader perempuan terbaiknya. Baginya hal ini adalah contoh posting seragam masif yang diedarkan opetor FB PSI Bandar Lampung, untuk pencitraan lebih baik.

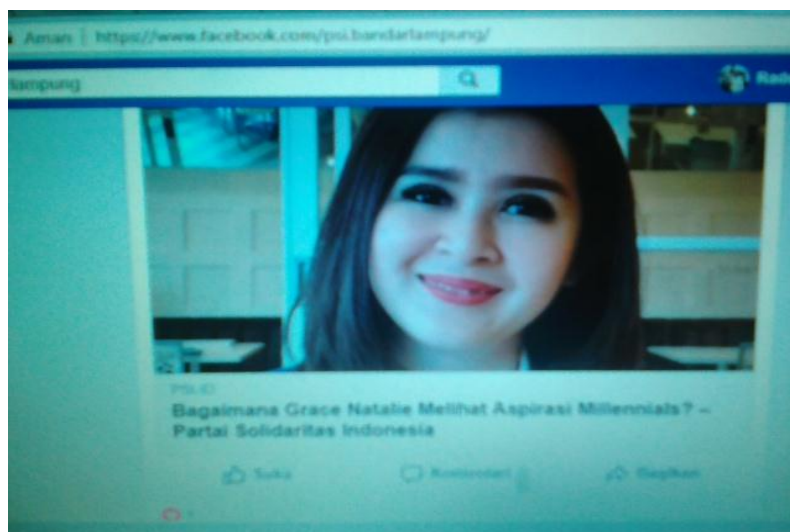
Berikut ini tabel 1. hasil penggambaran framing Robert M. Entman:

Tabel Hasil Framing Robert M. Entman

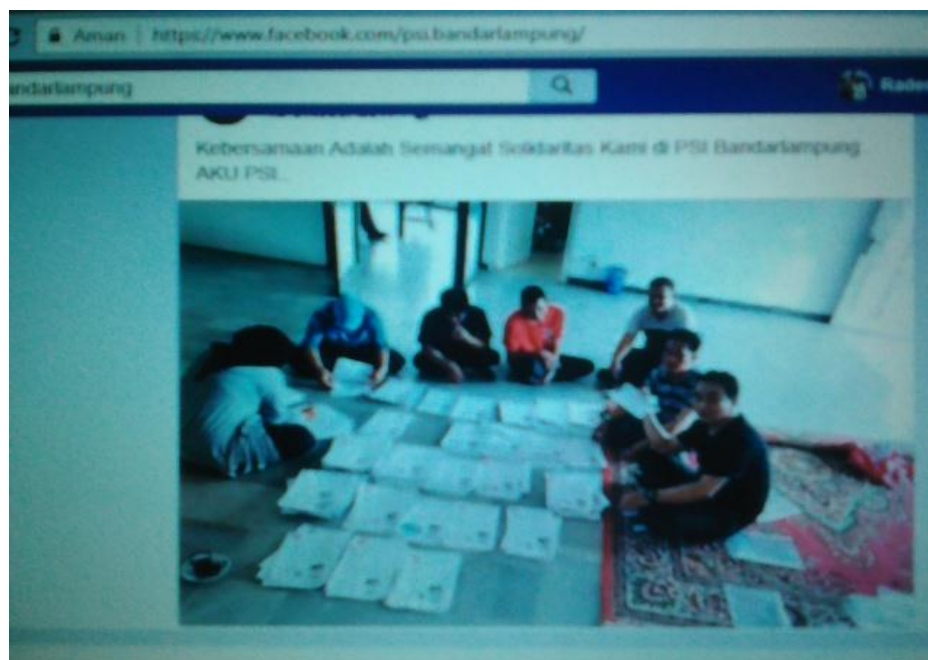
Nama Informan	Definisi terhadap masalah	Interpretasi sebab akibat	Evaluasi moral	Tawaran penyelesaian	Keterangan
Ketum dan pendiri PSI, Grace Natali	Gender perempuan terbuka luas masuk sebagai fungsionaris, dan pengurus parpol tak boleh berusia lebih dari 45 tahun saat menjabat. "Kurang dari 1 hari boleh, saat menjabat sebagai fungsionaris pengurus dan kader partai.	Implementasi kesetaraan gender dilakukan PSI hanya mengakomdir keberadaan perempuan berusia dibawah 45 tahun. Berarti kesetaraan gender berdasarkan ideologi partai bersifat terbatas	Kembali kepada ideology dan garis besar perjuangan partai	Hidup dan bekerja untuk menegakan kesetaraan gender dengan usia yang dibatasi karena garis besar haluan partai tersebut mengusung jargon partai anak muda dan partai perempuan	Kepercayaan dan keyakinan yang besar untuk tegaknya implementasi kesetaraan gender terlihat dari antusiasnya perempuan yang bergabung sebagai kader PSI.
Kader PSI pusat, Tsamara Amany	Melaporkan akun FB Hulk karena melecehkan perempuan dengan menuduh Ketum PSI Grace Natalie selingkuh dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.	Terjadinya ambiguitas dalam teori dan praktik isu kesetaraan gender terutama soal demokrasi. Itu bentuk kritik terhadap peran perempuan yang hanya dianggap sebagai korban bullyan manufer politik oposisi di era demokrasi	Adanya bentuk penanaman ketidakpercayaan terhadap pola ideologi dan garis besar perjuangan partai di era demokrasi baru (reformasi)	PSI harus lebih bersikap kritis terhadap politik hasut menghasut, menjatuhkan dan mendeskriminasi kesetaraan gender dalam demokrasi reformasi	Menunjukkan adanya upaya penanaman uatuhan terhadap PSI pada upaya perbedaan pandangan terhadap masalah perselingkuhan terhadap isu kesetaraan gender
Operator FB PSI Bandar Lampung	Kebersamaan adalah semangat solidaritas kader di PSI Bandar Lampung.AKU PSI.	Bentuk penanaman kepercayaan diri kepada public, khususnya followerFB PSI Bandar Lampung.	Mendukung segala bentuk pergerakan dan aktifitas yang terjadi diinternal local PSI Bandar Lampung	Menjadi pendukung dan simpatisan pejuangan fungsionaris dan kader partai	Mempercayai dan menyakini akun FB menjadi solusi mengeleminir isu kesetaraan gender.
Operator FB PSI Bandar	PSI adalah kelahiran solidaritas baru. PSI adalah masa depan,	Banyak ketidakadilan	Dari ketidakadilan tersebut	Terus bekerja demi	PSI dapat dijadikan

Lampung	bukan bagian dari masa lalu	terjadi salah satunya isu kesetaraan gender	bisa diambil hikmahnya	mencapai masa depan yang baik daripada terus berkaca pada masa lalu.	pegangan hidup dan bagian dari kepercayaan public yang optimis akan datangnya keadilan kesetaraan gender.
Ketum dan Pendiri PSI Grace Natali	Kami juga salut dengan bro dan sis, hingga di detik-detik akhir proses verifikasi tetap aktif bekerja dan terus memantau dari perkembangan partai.	Setiap kebijakan harus ada pengawalan	Kerjakeras dan eksistensi kerja partai hanya berhasil dilakukan internal	Kembali kepada ideology dan garis besar perjuangan partai	Kepercayaan terhadap partai sebagai pengawalan dari segala eksistensi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan.
Operator FB PSI Bandar Lampung	Dicari Orang Baik Untuk menjadi calon anggota legislative 2019, dengan background gambar ilustrasi sosok perempuan yang dominan.	Opini negatif dilawan dengan mencari calon (diupayakan banyak dari kalangan perempuan) yang mampu kerja dan ikhlas terhadap pengabdian. Hal ini menjawab keraguan kepada PSI yang hanya menang jargon partai anak muda dan perempuan	Mengoptimalkan implementasi kesetaraan gender dalam politik praktis itu banyak cara, salah satunya publikasi lewat FB partai.	Bekerja dengan baik dan terus mengabdikan secara kontinu	Bila mendapatkan kepercayaan dengan bekerja dengan baik, tentunya akan mendapatkan dampak yang baik pula.

LAMPIRAN :







Daftar Pustaka

Buku

- Easton, David. 1965. *A System of Political Life*. London: John Wiley & Sons, Inc
- i. Eriyanto. 2008. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS
 - ii. Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
 - iii. Krech, David; Crutchfield, Richard; and Ballachey, Egerton L. 1962 *Individual in Society: A Textbook of Social Psychology*. New York: McGraw-Hill.
 - iv. Panuju, Redi. 2003. *Framing Analysis*. Surabaya: Universitas dr. Sutomo
 - v. Pawito. 2008. *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Jakarta: Jalasutra
 - vi. Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Online
- i. <https://www.facebook.com/psi.bandarlampung/> (diakses 13 Juni 2018)
 - ii. <https://www.merdeka.com/grace-natalie/> (diakses 13 Juni 2018)
 - iii. <https://psi.id/berita/tag/grace-natalie/> (diakses 13 Juni 2018)
 - iv. <https://psi.id/berita/2018/06/15/grace-natalie-tsamara-amany-dan-serangan-kampanye-hitam-terhadap-perempuan-politisi-psi/> (diakses 14 Juni 2018)
 - v. <https://www.viva.co.id/siapa/read/687-grace-natalie/> (diakses 14 Juni 2018)

MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL

Hartoyo

Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan posisi dan otoritas lembaga zakat masyarakat dalam pengelolaan zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa model pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 memiliki keterbatasan substantif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah hanya mampu mengukuhkan BAZ dan LAZ, tetapi kurang melakukan pembinaan dan perlindungan. Akibatnya, masing-masing lembaga zakat dibiarkan bekerja dalam ruangnya sendiri, elitis, melakukan fungsi yang sama, dan terjadi konflik kepentingan. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 merupakan jawaban atas berbagai persoalan hukum tentang pengelolaan zakat. Kelemahannya adalah BAZNAS selain memiliki otoritas lebih juga dapat menjalankan fungsi LAZ dan UPZ. Model ini masih rentan terjadi konflik kepentingan antar pengelola zakat. Model integrasi dapat menjadi solusi dengan tetap memberi ruang otoritas kepada negara sekaligus mampu memberdayakan peran masyarakat sipil. Model ini mampu mengoptimalkan peran LAZ dan UPZ yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.

Kata kunci: pengelolaan zakat, negara, lembaga, masyarakat sipil, integrasi.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang pengelolaan zakat di Indonesia melahirkan konstruksi makna dikotomis pada dua ruang negara dan masyarakat sipil, tradisional dan moderen, berada pada ranah pengetahuan dan keotoritasan institusional (Foucault, 2002; Mills, 2007). Hal ini memiliki implikasi praksis dan pada ranah publik berhubungan dengan kekuatan kontrol sosiopolitik oleh rezim pengetahuan (Turner, 1983), dan melahirkan kategori yang saling membatasi, menguasai, dan mengarahkan. Tujuan zakat difahami sama, tetapi di antara kelompok aktor

berbeda dalam relasi antar struktur sosial, ekonomi dan politik, bahkan bisa berseberangan (Kuntowijoyo, 1991).

Pelembagaan zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi menjadi landasan utama terwujudnya kepedulian sosial. Oleh karena itu, makna keadilan distributif pada tataran kelembagaan dalam pengelolaan zakat menjadi penting (Rowls, 1999). Tetapi, struktur pengetahuan dan pengelolaan zakat yang berkembang, berpengaruh secara timbal-balik dengan kebijakan pemerintah. Seperti disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat membuka

berkembangnya lembaga zakat moderen.

Berkembangnya lembaga zakat moderen masih diragukan efektifitasnya, karena kurang diantisipasi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Koordinasi, sinergi dan komunikasi antar lembaga zakat masih lemah, dan berkembang persoalan sosial, kultural, ekonomi dan politik. Situasi sosiokultural pengelolaan zakat telah berkembang begitu pesat melampaui jangkauan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sehingga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Situasi ini yang mendorong segera dilakukan amandemen sampai berhasil disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Segera setelah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendapat kritikan oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama ditujukan pada empat persoalan utama, yaitu tentang pembentukan BAZ di provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15); tentang persyaratan izin pendirian LAZ (Pasal 18); tentang mekanisme koordinasi antar BAZNAS hingga ke tingkat kabupaten/kota (Pasal 29); dan tentang ancaman sanksi bagi masyarakat yang mengelola zakat tetapi tidak mempunyai izin (Pasal 38 dan Pasal 41) (Juwaini, 2011). Dilihat dari sisi dinamika perubahan sosial, maka kritik tersebut adalah wajar. Dilihat dari substansi kebutuhan hukum berkaitan dengan dinamika kelembagaan zakat,

maka kritik tersebut penting dipertimbangkan.

Terdapat sejumlah persoalan sosiokultural dan hukum dalam masyarakat pada situasi sebelum dan sesudah disahkan UU No. 38 Tahun 1999 hingga saat ini (setelah disahkan UU No. 23 Tahun 2011). Berbagai penelitian yang membedah fungsi, potensi dan ragam manfaat zakat belum secara optimal mampu mengatasi persoalan pengelolaan zakat di masyarakat. Pengelolaan zakat ke depan harus mampu menerapkan manajemen mutu dan memegang prinsip syari'ah dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan distributif (Bariyah, 2010).

Realitas pengelolaan zakat yang berkembang dari waktu ke waktu berada pada tataran dualitas struktur dan agensi aktor. Pengelolaan zakat berhubungan dengan struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi, berproses terus menerus, berdialektika, dan bekerja dalam kesatuan ruang kognitif dan praksis (Giddens, 2004). Penelitian ini bertujuan, pertama, menjelaskan respon lembaga zakat masyarakat terhadap pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kedua, menjelaskan aspirasi para pengelola lembaga zakat masyarakat dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan strukturasi. Pendekatan ini meletakkan situasi sosial pengelolaan zakat sebagai suatu proses

saling pengaruh antara bekerjanya struktur dan agensi aktor, dengan lembaga zakat sebagai unit analisisnya. Pendekatan strukturalis dipilih karena kelembagaan pengelolaan zakat sebagai realitas obyektif dan hasil proses pembingkian kolektif sehingga terdapat proses pemaknaan subyektif dan intersubyektif.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung didasarkan pada empat pertimbangan utama. Pertama, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, banyak lembaga zakat masyarakat yang berdiri secara formal dan bekerja secara profesional menggunakan sistem moderen, dan lembaga zakat komunitas yang bersifat musiman (tradisional). Ketiga, lembaga zakat moderen diambil sebagai sumber data. Keempat, lembaga zakat komunitas diambil berdasarkan disampel wilayah dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang berada di wilayah pusat kota dan Kecamatan Kedaton yang berada di pinggiran kota Bandar Lampung.

Data primer dikumpulkan berupa berbagai data, fakta, opini, pandangan dan respon tinjauan tentang berbagai pengetahuan tentang pengelolaan zakat yang terjadi di lingkungan komunitasnya dan yang mungkin terjadi menurut pandangan mereka sesuai dengan realitas saat ini, dan harapan pengelolaan zakat mendatang berkaitan dengan yang mereka ketahui dan yang mereka harapkan. Sedangkan data sekunder yang akan dikumpulkan berupa berbagai teks, laporan kegiatan, hasil penelitian, gambar dan angka-

angka yang dimiliki oleh lembaga zakat dan lembaga lain sebagai dokumen.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber hukum otoritatifnya adalah Al-Qur'an dan Hadits, didukung oleh peraturan perundangan tentang dan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sumber data lainnya adalah data-data primer yang akan dikumpulkan dari informan dan responden berdasarkan jenis data yang diperlukan. Selain itu, data-data sekunder yang mendukung penelitian juga akan dikumpulkan dari berbagai lembaga zakat dan lembaga lainnya yang memiliki data dan informasi yang diperlukan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengelola zakat, pemberi zakat dan penerima zakat. Data diolah dan dianalisis secara preskriptif melalui tahapan deskripsi, sistematisasi, interpretasi, serta penilaian (Meuwissen, 1994:26-28). Hasil olahan dan analisis data kemudian digunakan sebagai argumen untuk memberikan preskripsi terhadap konsep hukum tentang pengelolaan zakat.

Untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi, maka dalam analisis ini menggunakan prosedur triangulasi dengan mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan cara pengumpulan data yang berbeda. Dengan demikian, penarikan kesimpulan tidak cukup sekedar olah pemikiran secara teoritis tetapi harus dibuktikan oleh perilaku, wacana, dan hubungan sosial para aktor yang menjadi subyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Zakat di Daerah

Terdapat keragaman struktur kelembagaan yang sejalan dengan keragaman konstruksi pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan zakat. *Pertama*, pengelolaan zakat difahami berada pada otoritas negara. Zakat dipercaya sebagai kewajiban beragama terkait dengan sumber pembiayaan penegakan agama, dan sebagai sumber pendapatan negara. Pengelolaan zakat berada pada ruang gagasan negara, terobjektivasi dalam ruang bernegara dan dalam proses pelembagaan sepenuhnya dipengaruhi oleh otoritas negara. *Kedua* pengelolaan zakat difahami bukan berada pada otoritas negara yang direpresentasikan oleh pemerintah (*umaro*) tetapi berada pada para pemimpin agama. Ulama (atau para tokoh agama) dilihat berada pada ruang tersendiri, beroperasi secara otonom, dan memiliki otoritas pengelolaan zakat yang setara dengan *umaro*. Kepemimpinan ulama berada dalam ruang agama yang mengakar pada tingkat komunitas (*grassroots*) dan terlepas dari ruang politik yang dimiliki oleh negara.

Dualisme pemahaman di atas minimal melahirkan dua model pengelolaan zakat, yaitu berbasis negara (BAZNAS) dan berbasis Lembaga Amil Zakat Komunitas (LAZ-K). Struktur otoritas pengelolaan zakat pada LAZ-K berada pada tiga level. Pertama, adalah pengelolaan zakat berada pada para otoritas agamawan (tokoh agama) dan berpusat di masjid, musolla, dan

madrasah. Kedua, otoritas pengelolaan zakat diletakkan pada amil dan agamawan atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh agamawan. Ketiga, adalah otoritas distribusi zakat berada pada agamawan, amil atau muzakki secara individu yang diakui berhak untuk menyalurkan sendiri atau menyalurkan lewat amil zakat komunitas. Meskipun terdapat keragaman struktur otoritas dalam pengelolaan zakat komunitas, tetapi tetap terkonsentrasi pada agamawan lokal sebagai pemilik otoritas pengetahuan tertinggi.

Struktur otoritas pengelolaan zakat pada negara (BAZNAS) berada pada dua level, yaitu pada otoritas agamawan dan aparat pemerintah. Tetapi, otoritas tertinggi tetap berada pada aparat pemerintah dibandingkan dengan agamawan. Agamawan di luar pemerintah hampir tidak diberi ruang akses dalam mewarnai perkembangan pengetahuan dan praktek pengelolaan zakat. Paling lemah adalah para pemberi zakat (*muzakki*) dan para penerima zakat (*mustahik*) keduanya berada pada level yang tidak memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat, hanya memiliki moral kepatuhan dalam memberi dan menerima zakat. Para agamawan diakui memiliki otoritas pengetahuan tentang pengelolaan zakat, tetapi para agamawan lokal pada LAZ-K memiliki otoritas lebih. Otoritas agamawan pada BAZNAS terbatas pada pengetahuan zakat dan pengelolaannya dan dalam membuat fatwa dalam koridor ajaran Islam.

Tabel 1 Tipologi Pengelolaan Zakat

Unsur	LAZ-K	BAZNAS
Basis Kelembagaan	Komunitas Lokal Keagamaan	Negara/Pemerintah
Basis Pengetahuan	Lokal-tradisional	Modern
Sistem rasionlitas	Nilai-nilai Lokal	Politik
Orientasi atau Kepentingan	Penguatan dan kemandirian komunitas	Penguatan negara (integratif)
Manajemen	Tradisional	Moderen
Budaya	Lokal-tradisional	Birokasi Pemerintah
Landasan hukum	Norma (moral) lokal	Hukum positif

Terdapat ragam otoritas pengelolaan zakat (Tabel 1). *Pertama*, pengelolaan zakat pada LAZ-K berbasis pengetahuan lokal-tradisional, dengan rasionalitas budaya setempat, terfokus pada kepentingan penguatan dan kemandirian komunitas, memobilisasi tindakan berzakat dengan menggunakan kekuatan norma-norma lokal-tradisional. Model ini dilakukan antar generasi dan berada dibawah otoritas agamawan lokal. *Kedua*, pengelolaan zakat pada BAZNAS berbasis pengetahuan modern dengan rasionalitas politik, mengelola zakat dengan kepentingan penguatan peran negara menuju situasi integratif, dan memobilisasi zakat menggunakan kekuatan hukum positif. Ini merupakan model kelembagaan zakat modern hasil dari pertemuan antara struktur pengetahuan agama dan struktur pengetahuan politik modern.

Kedua lembaga zakat tersebut masing-masing memiliki landasan etika moral yang berbeda. LAZ-K berlandaskan asketisisme dan altruisme menilai bahwa pengelolaan zakat sebagai keharusan dan menjadi tugas dan kewajiban bagi pemimpin agama selaku pewaris Nabi. Pengelolaan zakat

komunitas berorientasi pada pencapaian derajat kesalehan ummat. Dikatakan shaleh karena mentaati perintah agama secara individu dan melakukan kebajikan yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya dalam meningkatkan kesadaran beragama terhadap ummat yang memiliki harta berlebih sebagai pemberi zakat, membantu kesulitan yang lemah sebagai penerima zakat, dan menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai lahir dan batin. Keberadaan LAZ-K dianggap sebagai wujud pelembagaan nilai kesalehan dalam bentuk penguatan ajaran agama dan penguatan tata kehidupan komunitas.

BAZNAS berlandaskan etika moral *developmentalism* yang meyakini bahwa pengelolaan zakat adalah hak dan tanggungjawab negara, mengharuskan berada pada pemerintah, berorientasi pencapaian stabilitas masyarakat dan negara melalui penyeragaman sistem pengelolaan. Pengelolaan zakat dipandang sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan, sebagai wujud kepedulian negara dalam mengentaskan kemiskinan, sekaligus sebagai wujud pembangunan spiritual. Meskipun para aktor zakat cukup terbuka dalam

mengembangkan orientasinya sendiri-sendiri, tetapi semuanya bermuara pada otoritas negara melalui pemerintah.

Ragam rasionalitas pengetahuan zakat ini berpengaruh terhadap praktek pengelolaan zakat, tetapi tidak tampak berpengaruh terhadap kepentingan para penerima zakat. Kepentingan para penerima zakat adalah pada pengamanan ekonomi level survival. Rasionalitas pada LAZ-K adalah *commonality* dan *togetherness* yang menonjolkan tujuan kemandirian lokal, yang tampak dari tekanannya pada penguatan ajaran Islam dan ikatan sosial lokal pada level komunitas. Ketaatan, kepatuhan dan membangun semangat keberagamaan dalam suasana hangat antara yang kaya dengan yang lemah, semua berada dibawah kontrol agamawan lokal. Sedangkan asketisisme dan altruisme termodifikasi dalam sintesis dengan etika moral developmentalisme pada BAZNAS, sedangkan semangat pengelolaan zakat pada BAZNAS adalah pemberdayaan dan pembangunan.

Otoritas pengelolaan pada masing-masing lembaga zakat memiliki ragam basis legitimasi. BAZNAS berlandaskan pada sistem pengetahuan modern dan tunduk pada struktur rasionalitas tertentu. Dengan rasionalitas politik menggunakan ruang politik yang diperkuat dengan legitimasi peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Sedangkan LAZ-K berbasis pada sistem pengetahuan lokal, menggunakan ruang sosiokultural lokal, tunduk pada rasionalitas lokal dan menekankan pada penguatan komunitas

di bawah legitimasi nilai-nilai dan norma-norma lokal.

Kompetisi pengetahuan tentang pengelolaan dan pelebagaan zakat pada tataran empiris berhubungan dengan otoritas dan kepentingan masing-masing lembaga zakat. Pengetahuan menjadi kekuatan utama dalam membentuk dan mengarahkan berbagai tindakan dalam pengelolaan zakat. Seperti BAZNAS mengklaim bahwa PNS, karyawan BUMN dan BUMD adalah para pemberi zakat yang berada pada wilayah otoritasnya. Sosialisasi untuk memperkuat legitimasi dilakukan melalui berbagai media bahwa zakat seharusnya dikelola pemerintah. Selain itu, dikembangkan konsep-konsep dikhotomi sebagai pembanding dan kategorisasi, seperti modern dan tradisional, efektif dan tidak efektif, profesional dan musiman, efisien dan tidak efisien.

Jadi, struktur pengetahuan tentang pengelolaan zakat ketika berada pada wilayah otoritas lembaga tertentu kemudian menjadi basis penundukan dalam beragam lembaga zakat. Masing-masing berusaha mencapai kepentingannya, terjadi persaingan dan bahkan rentan saling menegasikan. Konsep-konsep seperti tidak resmi, menyimpang dan membangkang kemudian muncul sebagai pengkategorian dan penaklukan. LAZ-K terancam sebagai lembaga zakat, terpinggirkan dari arena pengelolaan zakat dan bahkan bisa ditiadakan, kecuali jika mau tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Benturan pada tataran ide kemudian melebar pada ranah kepentingan (praktis), yaitu saling

berebut para pemberi dan penerima zakat. Masing-masing lembaga zakat rentan memposisikan pemberi dan penerima zakat sebagai komoditas dan saling mengklaim dengan menggunakan otoritasnya.

Benturan kepentingan pada tataran praktis terjadi karena beragam dominasi. Eksistensi LAZ-K dominasi oleh para agamawan yang mampu mengkooptasi ruang gagasan komunitas dan mendapat legitimasi sosiokultural lokal. Pada BAZNAS dominasi oleh negara dan mengkooptasi ruang gagasan warga negara oleh rezim pengetahuan negara dibawah legitimasi peraturan perundang-undangan. Para pemberi zakat pada BAZNAS dan LAZ-S hampir tidak memiliki ruang untuk mengarahkan dan membentuk perilaku berzakat mereka. Derajat otoritas pemberi zakat dilemahkan dalam wacana delegasi lembaga perantara kepada penerima zakat. Ketidakpuasan dan bahkan resistensi para pemberi zakat diredam melalui tekanan kelembagaan dan tindakan itu beresiko pada terganggunya kelangsungan sumber ekonomi. Sebagai konsekuensinya adalah terjadi kepatuhan semu yang hanya tunduk pada kepentingan pengamanan sosial dan ekonomi. Mereka yang mendapat penghargaan dari penerima zakat dan dari masyarakat luas adalah pemerintah (dan aparatnya).

Para pengelola dan pemberi zakat pada LAZ-K berhubungan langsung dengan para penerima zakat. Situasi ini juga rentan menjadi ajang memperoleh penghormatan dan perlindungan personal. Para pengelola dan para

pemberi zakat berpeluang dikonstruksi sebagai pengayom, penyelamat, orang baik, sholeh dan peduli kepada kaum lemah, sehingga layak untuk dihormati, dipatuhi dan bahkan dilindungi. Model hubungan seperti ini juga rentan terhadap reduksi perilaku ibadah ke dalam hubungan patron-klien dan berbagai hubungan pertukaran yang pragmatis.

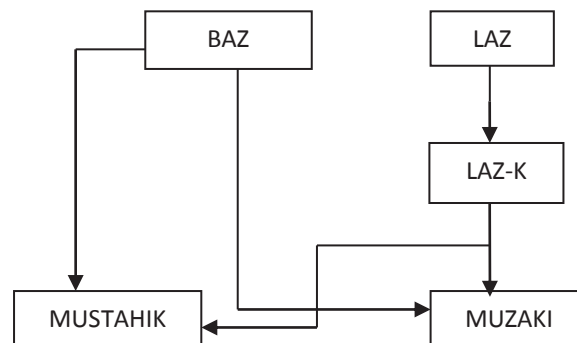
Pengaruh Keberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 Terhadap Dinamika Lembaga Pengelolaan Zakat

Pandangan dualisme pengelolaan zakat apakah berada pada otoritas negara atau pada masyarakat sipil, menghasilkan sikap pro dan kontra. Menurut Shihab (1992), negara bertanggungjawab atas pelayanan dan kepentingan umum, sehingga berhak mengelola zakat sebagai sumber keuangan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Bahkan Gusfahmi (2009), menguatkan bahwa sudah waktunya zakat dikelola langsung oleh negara di bawah Menteri Keuangan. Sedangkan Abdalla (2005) menolaknya dengan alasan politik, jika zakat berada di bawah keotoritasan negara, maka kekuatan masyarakat sipil akan melemah karena zakat merupakan salah satu sumber kekuatan masyarakat sipil.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan sikap pemerintah dalam rangka institusionalisasi pengelolaan zakat. Tidak dapat dihindari bahwa sikap negara (pemerintah) tersebut juga berpeluang menjadi bagian dari keragaman pengetahuan dalam pengelolaan zakat yang berpengaruh

pada tataran praktek. Akibatnya, di daerah banyak bermunculan lembaga zakat modern. Fenomena ini menurut Karim dan Syarief (2009) disebabkan oleh dua faktor menarik dan pendorong. Faktor penariknya adalah semangat menyadarkan umat, melayani secara profesional, berinovasi membantu

mustahik, dan memberdayakan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya adalah potensi dana zakat besar, regulasi mulai mendukung, infrastruktur teknologi informasi menunjang, dan tingkat kesadaran masyarakat makin meningkat.



Meskipun disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan ummat baik ukhrowi maupun duniawi (Pasal 5), pada tataran normatif dan empiris masing-masing lembaga zakat (pemerintah dan komunitas) memainkan fungsi yang sama (Gambar 1). Pada tataran normatif, pemerintah diberi ruang untuk mengelola zakat melalui BAZ (Pasal 6), tetapi pada sisi lain masyarakat juga diberi ruang yang sama untuk menjalankan fungsi yang sama melalui LAZ (Pasal 7). Memang negara memiliki otoritas meskipun di dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa negara sebagai satu-satunya lembaga pengelolaan zakat. Realitasnya, berkembangnya lembaga zakat moderen tidak diikuti dengan sistem tatakelola yang baik, yakni tidak terintegrasi, terkoordinasi,

dan sistem kontrol yang lemah. Situasi demikian membuat masing-masing lembaga zakat semakin larut asyik bermain dalam ruangnya sendiri. Berkembangnya lembaga zakat modern tidak disadari menjadi bersifat elitis. Pada sisi lain, lembaga zakat tradisional yang bersifat musiman masih tetap eksis dan juga berjalan sendiri-sendiri.

Persoalan hukum tentang pengelolaan zakat yang berkembang, selain sebagai akibat dari keberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 juga yang mendorong dilakukan amandemen, sehingga wacana pengelolaan zakat lebih terkonsentrasi pada otoritas negara. Di dalam draft rancangan amandemen disebutkan bahwa zakat sepenuhnya dikelola oleh negara melalui BAZ yang dibentuk di semua tingkatan pemerintahan, dan LAZ akan berfungsi hanya sebagai unit

pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan BAZ (Susetyo, 2008: 26). Berdasarkan UUD 1945 amandemen 4 Pasal 23 (A) dinyatakan bahwa zakat (jika dipandang termasuk sebagai pungutan lain) dapat diatur dengan Undang-Undang sejauh bersifat memaksa untuk keperluan negara. Pasal tersebut juga dikuatkan Pasal 20, 21, 28 E ayat (1), 29, dan Pasal 34 ayat (1).

Terdapat pandangan bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya berada pada otoritas negara masih diragukan efektivitasnya. Menurut Prayitno (2008) sistem pengelolaan zakat yang selama ini berlaku dinilai masih klasikal, konsumtif dan terkesan tidak efisien, sehingga kurang berdampak sosial dan ekonomi yang berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga belum secara jelas menentukan sikapnya apakah menganut paradigma kesejahteraan sosial residual, institusional, atau developmental (Adi, 2005: 108). Jika menggunakan tipologi Esping-Anderson (dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2007:9), juga masih belum jelas apakah pengelolaan zakat di Indonesia termasuk varian rezim kesejahteraan sosial liberal, sosial demokrat, atau konservatif. Pada tataran normatif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia cenderung menganut sistem ekonomi kerakyatan yang berusaha mencapai keadilan dan kemakmuran secara bersama. Ketika Indonesia tidak mampu menghindar dari arus ideologi neoliberal, maka bukan tidak mungkin bahwa pengelolaan zakat akan masuk

pada pendekatan kesejahteraan sosial residual.

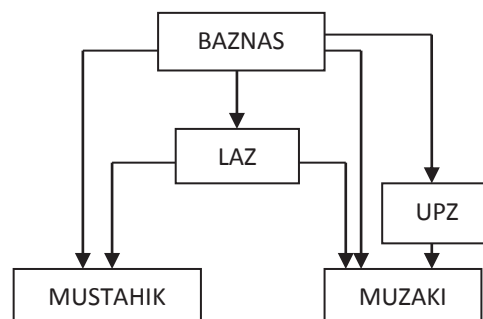
Model Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat tidak hanya sekedar dibingkai dalam suatu produk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), namun diharapkan menjadi hukum positif yang memiliki derajat keberlakuan yang tinggi (*ius constitutum*), dengan tidak mengabaikan realitas sosiologisnya. Situasi sosial ini dipengaruhi oleh “agensi” yang menunjuk pada tindakan aktor, yakni apa yang secara aktual dilakukan di dalam suatu situasi yang tampak memiliki konsekuensi dan tidak harus berupa konsekuensi yang diharapkan (Turner, 1998:497). Pelembagaan pengelolaan zakat diupayakan berada pada otoritas negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 38 Tahun 1999 ternyata mengalami disfungsi, bukan hanya karena lemahnya sistem aturan tetapi juga karena kuatnya intervensi agensi. Respon negara dengan semakin memperkuat otoritasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Manajemen profesional menjadi instrumen utama pengelolaan zakat dengan mengedepankan azas manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 3).

Di dalam struktur kelembagaan pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 (Gambar 2) diketahui bahwa, pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural semakin diperkuat posisi struktural dan otoritasnya dalam pengelolaan zakat. Kedua, bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berada dalam kontrol penuh BAZNAS. Fungsi LAZ hanya membantu melaksanakan salah satu dari lima tugas BAZNAS, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Pasal 1

ayat (7), 7 dan 17). Artinya, BAZNAS dapat melaksanakan tugas dan fungsi LAZ ketika ada atau tidak atau belum ada LAZ yang membantunya (Pasal 17). Ketiga, Unit Pengumpul Zakat (UPZ)



posisinya lebih lemah daripada LAZ, yaitu hanya berfungsi mengumpulkan zakat (Pasal 1 ayat (9)). Keempat, antara muzaki dan mustahik tidak ada hubungan pertukaran.

Memperhatikan model struktur pengelolaan zakat tersebut, maka eksistensi LAZ-K yang tadinya melaksanakan fungsi yang sama dengan BAZNAS menjadi dipersempit otoritas dan ruang geraknya. Konsekuensinya adalah fungsi LAZ-K menjadi gugur. Peluang itu ada hanya dengan cara mengubah dirinya menjadi Ormas (Pasal 18), atau menjadi UPZ (Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (1)). Selain itu, jika LAZ-K dapat mengaksesnya maka ia harus dapat mengubah dirinya

menjadi lembaga pengelola zakat moderen.

Model tersebut juga melekat hubungan kekuasaan pada tataran makna (pengetahuan) dan norma (aturan) yang berimplikasi pada praktek. Gambar 2 menunjukkan adanya relasi sosial dan dominasi antar lembaga zakat, di mana LAZ selain memiliki otonomi juga sangat tergantung pada BAZNAS. Oleh karena itu, ketika BAZNAS menjalankan fungsi yang sama dengan LAZ dan UPZ, maka situasi ini rentan terjadi benturan kepentingan berebut muzaki dan mustahik. BAZNAS dapat masuk ke ruang LAZ dan UPZ, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

aturan perundangan yang berlaku, tetapi tidak pada sebaliknya.

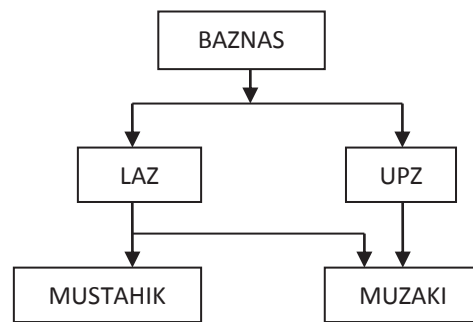
Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil

Kekuasaan pengelolaan zakat, baik dalam makna kelembagaan maupun dalam makna tindakan berhubungan dengan kemampuan aktor untuk mencapai tujuannya. Artinya, kekuasaan lebih tunduk pada subyektivitas aktor daripada mencerminkan sebagai milik masyarakat atau komunitas sosial. Struktur kelembagaan zakat dapat digunakan sebagai media untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan struktur dominasi dapat digunakan untuk memelihara hubungan kekuasaan dalam praktek pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, guna meningkatkan peran masyarakat sipil dan mengurangi benturan kepentingan dalam pengelolaan zakat, perlu dibangun model integrasi antara negara dan masyarakat sipil, melalui pemberdayaan dan pembinaan LAZ dan UPZ (Gambar 3).

Pertama, BAZNAS (Kabupaten/Kota) sebagai representasi negara perlu mengurangi fungsinya secara langsung dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang menjadi tugas LAZ sebagai representasi masyarakat sipil. Artinya, BAZNAS perlu melepaskan hubungan langsung dengan pemberi dan penerima zakat sekaligus memberdayakan dan membina LAZ dengan memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya dalam berhubungan langsung dengan pemberi dan penerima zakat.

Kedua, fungsi UPZ sebagai lembaga pengumpul zakat berhubungan langsung dengan pemberi zakat dalam segmennya yang khusus. BASNAS perlu melepaskan hubungan langsung dengan pemberi zakat sekaligus memberdayakan dan membina UPZ dengan memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pengumpulan zakat. Hasil zakat yang dikumpulkan UPZ diserahkan kepada BAZNAS untuk kemudian disalurkan oleh LAZ.

Ketiga, suatu realitas struktur pengelolaan zakat dapat berubah karena tindakan aktor, dan sebaliknya perlu penguatan struktur. Secara kelembagaan, sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Tetapi, dilihat dari sisi aktor, mengacu pada karakter kepemimpinan Muhammad SAW adalah *sidiq* (benar), *amanah* (dipercaya), *tabliq* (da'wah) dan *fatonah* (pandai). Sebaliknya, untuk mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan dari berbagai tindakan aktor diperlukan bangunan struktur yang memadai. Mengikuti pandangan Cheema (1983), perlu dibangun sistem koordinasi yang sinergis dan adaptif terhadap model integrasi pengelolaan zakat. Semua itu akan dipertaruhkan dalam pengaturan lembaga zakat ke depan (*ius constituendum*), baik yang menjadi representasi kepentingan negara maupun masyarakat sipil.



KESIMPULAN

Melalui alat analisis yuridis normatif dan empiris yang dikuatkan dengan pendekatan strukturasi, tampak jelas bahwa model pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 memiliki keterbatasan secara substantif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah negara melalui pemerintah cukup kuat dalam mengukuhkan BAZNAS dan LAZ, tetapi masih lemah dalam pembinaan dan perlindungan terhadap Lembaga zakat masyarakat. Akibatnya, masing-masing lembaga zakat masyarakat dibiarkan bekerja secara otonom di dalam ruangnya sendiri, bersifat elitis, melakukan fungsi yang sama, dan terjadi perebutan kepentingan.

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 merupakan jawaban atas berbagai persoalan hukum pengelolaan zakat yang berkembang di masyarakat. Kelemahannya adalah, pertama, BAZNAS selain memiliki otoritas lebih juga dapat menjalankan fungsi LAZ dan UPZ. Kedua, pada tataran praksis masih rentan terjadi konflik kepentingan antar aktor dan antar lembaga pengelola zakat. Ketiga, terjadi eksklusifitas pengelolaan zakat komunitas. Oleh

karena itu, upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat mendatang (*ius constituendum*) perlu mempertimbangkan model integrasi pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil. Perspektif yang dibangun adalah menempatkan keduanya bersifat dualitas, bukan dualisme, apalagi bersifat dikhotomi. Upaya integrasi berarti menciptakan ruang yang tetap mempertahankan otoritas pengelolaan zakat pada negara dan sekaligus mampu memberdayakan peran masyarakat sipil. Salah satu solusinya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi LAZ dan UPZ yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. 2005. *Menjadi Muslim Liberal*, Jakarta: Nalar.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Konsep dan Pokok Bahasan Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, UI Press.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. 2010. Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik).

- Disertasi*, Jakarta, Program Studi Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, (ed). 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California, Beverly Hills, Sage Publications, Inc.
- Foucault, M. 2002. Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Terjemahan dari P Rabinow, ed. *Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Giddens, Anthony. 2004. *The Constitution of Society: Teori Strukturalisasi untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sjno. Pasuruan, Pedati Press.
- Gusfahmi. 2009. "Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan", *Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Volume II, halaman 1-13.
- Juwaini, Akhmad. 2011. "Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan", <http://imz.or.id/new/uploads/2011/11/Notulensi-Diskusi-UUZakat-FOZ-24-November-2011.pdf>.
- Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief. 2009. Fenomena Unik di Balik Menjamurnya LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol 1. No. 4.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan.
- Meuwissen, D.H.M. 1994. "Pengembangan Hukum", di Indonesiakan oleh B. Arief Sidharta, *Pro Justitia*, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 1.
- Mills, Sara. 2007. *Diskursus : Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial*, Jakarta, Qalam.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press.
- Shihab, Moh. Quraish. 1992. *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, dalam *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2007. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta, Perkumpulan Prakarsa.
- Turner, Bryan S. 1983. *Religion and Social Theory: A Materialist Perspective*, London, Heinemann.
- Turner, Jonathan H. 1998. *The Structure of Sociological Theory*, Sixth Edition, Wadsworth Publishing Company.